



# Cahaya Pengawasan

Independen - Profesional - Integritas

Pengawasan Kinerja  
Lewat  
Aplikasi SIMWas

Ada Barcode di Paspor  
Warga  
Negara Asing

BPK Audit  
Laporan Keuangan  
Kemendiknas

Dibalik  
Kisah  
BNN

Temukan  
Sel Mewah  
Lapas  
Kelas I  
Cipinang

# SAYA INDONESIA SAYA PANCASILA!

29 MEI 2017  
4 JUNI 2017 #PEKANPANCASILA



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

## PEMBENTUKAN UNIT KERJA PRESIDEN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (UKP-PIP)

Dasar pembentukan: Perpres 54 Tahun 2017



### APA TUGASNYA?

Mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi bangsa dan negara saat ini. Selain itu Unit ini juga melakukan pembinaan ideologi secara sistematis dan terencana.

### UKP-PIP AKAN TERDIRI DARI



beberapa elemen seperti tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, tokoh purn. TNI, pensiunan PNS, dan akademisi. Ini dilakukan agar bisa mewakili berbagai pemikiran yang ada di Indonesia.

#SayaPancasila



## Pengantar Redaksi

Pembaca Budiman, dalam beberapa bulan belakangan ini Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham) melalui Tim Investigasinya menelusuri dua permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan wilayah kerja Direktorat Jenderal Pemasaryakatan.

Pertama adalah tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkok Kelas IIB Pekanbaru yang melakukan tindakan rusuh berujung mencoba melarikan diri dari dalam Rutan.

Kemudian telah ditemukannya sel mewah yang dihuni oleh Warga Binaan Pemasaryakatan (WBP) di Lembaga Pemasaryakatan (Lapas) Kelas I Cipinang.

Syukurnya, dua kejadian tersebut dapat diselesaikan dengan sigap oleh petugas Lapas maupun Rutan yang berkoordinasi dengan petugas Kepolisian dan TNI.

Lalu hal apa yang ditemukan Tim Investigasi Itjen Kemenkumham atas dua kejadian yang ramai diberitakan oleh media massa.

Lagi-lagi masalah muatan hunian di Lapas maupun Rutan yang sudah *over* kapasitas, sebagaimana kejadian di Rutan Pekanbaru.

Ternyata oh ternyata, masih saja ada petugas dibawah naungan lembaga Direktorat Jenderal Pemasaryakatan itu yang bertindak lacung tidak bertanggung

jawab dalam menjalankan tugasnya.

Padahal tugas mengayomi kepada WBP dan Tahanan di Lapas maupun Rutan adalah tugas mulia. Namun masih ada saja oknum petugas Lapas dan Rutan tidak menyadari tugasnya dalam bekerja.

Kemudian bagaimana dengan temuan fasilitas sel mewah di Lapas Cipinang? Ada lembaga pemerintah yang melakukan tindakan sepihak mengklaim bekerja sendiri.

Padahal petugas Lapas Cipinang memiliki peran serta yang besar mengusut temuan sel mewah tersebut.

Majalah Cahaya Pengawasan dalam Edisi ke-5 Semester 1 Tahun 2017 juga mewartakan beberapa berita menarik.

Semisal, dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berperan besar atas keberhasilan Kekayaan Intelektual Indonesia yang peringkatnya naik dalam peringkat dunia.

Tak ketinggalan beberapa kabar lainnya, mengenai teknologi yang memudahkan pengawasan dalam bekerja melalui Aplikasi SIMWas, rencana sistem *barcode* Direktorat Jenderal Imigrasi bagi Warga Negara Asing di Indonesia. Pendek kata, semoga pembaca budiman mendapat informasi dari berita yang kami sajikan ini.

Kami dari tim redaksi berharap mohon kritikan bilamana ada kabar yang kurang pas yang disampaikan kepada pembaca. *AkhirulKalam* selamat membaca.

## MAJALAH CAHAYA PENGAWASAN

### Pelindung

Dr. Aidir Aimin Daud, S.H., M.H., D.FM.

### Pembina

Luluk Ratnaningtyas, S.H., M.Hum.

### Pimpinan Redaksi

Joko Martanto.

### Redaktur

M. Mufid dan Slamet Iman Santoso.

### Reporter

Wahyu Ramanda dan Hafidz Zulkarnain.

### Desain Grafis

Arief Sulaeman.

### Sirkulasi

Raden Bagus Wasito Utomo.

### Produksi

Brahmatya Puji.

### Sekretariat

Abdul Rokhman dan Arief Rahman.

### Alamat Redaksi

Ex. Gedung Sentra Mulia Lantai 16,  
Jalan H.R.Rasuna Said Kavling 8 - 9,  
Kuningan, Jakarta Selatan.

### Telepon

(021) 5224658

### Email

itjen@kemenkumham.go.id



# Daftar Isi

## Berita Utama



Pemberantasan pungli merupakan salah satu upaya strategis bagi Kemenkumham dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kemenkumham.

## Berita Utama



Tim investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi dan Manusia melakukan penelusuran penyebab Rumah Tahanan Negara Sialang Bungkok. Lagi-lagi soal *over* kapasitas dan terdapat oknum petugas yang berbuat meresahkan tahanan.

## Laporan



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berpesan perlu revolusi mental petugas Lembaga Pemasyarakatan.

## Lintas Pengawasan



Menteri Yasonna Hamonangan Laoly bersama komisi III DPR membahas *over* kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

## Seputar Pengawasan



Aplikasi SIMWas sudah bisa diakses dan di input dengan cepat. Cara aksesnya dapat dari PC, Laptop, maupun Smartphone.

# Daftar Isi

PENGANTAR REDAKSI	05
DAFTAR ISI	06
BERITA UTAMA	08
LAPORAN	12
LINTAS PENGAWASAN	22
SEPUTAR PENGAWASAN	27
AKTUALITA	34
JENDELA PERISTIWA	36
LINTAS KEGIATAN	41
ARTIKEL	52
ROHANI	54
FILM	56



## Tim UPP Kemenkumham Bersungguh-Sungguh Berantas Pung-



*Pemberantasan pungli merupakan salah satu upaya strategis bagi Kemenkumham dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kemenkumham.*

Inspektur Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Aidir Amin Daud selaku ketua tim pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) memimpin jalannya rapat evaluasi dan pemantapan kinerja tim UPP Kemenkumham Tahun 2017.

“Pemberantasan pungli merupakan salah satu upaya strategis bagi Kemenkumham dalam rangka meningkatkan percepatan, keakuratan penanganan, dan penyelesaian pungli, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kemenkumham,” ujar-

ya, Rabu 11 Januari 2017.

Selain itu, hadir juga Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto yang membuka dan memimpin jalannya rapat Tim UPP dari masing-masing perwakilan unit eselon I pusat Kemenkumham.

Menurutnya dalam laporan kerja tim UPP Kemenkumham, masing-masing tim fokus pada prioritas terhadap pemberantasan pungutan liar, pemberantasan penyelundupan, relokasi penghuni Lapas yang overkapasitas, dan perbaikan layanan hak paten, merk dan design.

“Kepada tim UPP untuk selalu

menjaga integritas, loyalitas, kejujuran, disiplin, dan komitmen, serta sensitif juga responsif terhadap pengaduan dan permasalahan yang timbul,” Bambang Rantam berharap.

Senada dengan harapan Ketua Tim UPP Kemenkumham, Aidir Amin Daud berpesan kepada semua tim UPP yang hadir saat itu, untuk serius dan tidak main-main dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan pungli pada jajaran Kemenkumham.

“Ingatkan dan sadarkan teman-teman di sekeliling kita untuk tidak melakukan pungli,” ujarnya.

## Ada Apa Dibalik Rutan Sialang Bungkok Rusuh ?



*Tim investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi dan Manusia melakukan penelusuran penyebab Rumah Tahanan Negara Sialang Bungkok. Lagi-lagi soal over kapasitas dan terdapat oknum petugas yang berbuat meresahkan tahanan.*

Tim investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi dan Manusia (Itjen Kemenkumham) dipimpin langsung oleh Inspektur Wilayah II Nugroho dan anggota tim Reza telah melakukan penelusuran terhadap para tahanan yang melarikan diri dari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkok, Pekanbaru, pada Sabtu 6 Mei 2017.

Tim Investigasi Itjen Kemenkumham, menjelaskan bahwa dari hasil sementara jumlah tahanan yang sempat melarikan diri pada Jumat 5 Mei 2017.

Pihak petugas Rutan, aparat TNI, dan Kepolisian setempat telah menangkap kembali ratusan tahanan.

Dari sekitar 448 orang tahanan yang melarikan diri, sudah berhasil kembali tertangkap sebanyak 235 orang tahanan, dan yang masih berada di luar sebanyak 213 orang,” ujar Reza.

Petugas Rutan, aparat TNI, dan Kepolisian sampai saat ini masih dalam pengejaran.

Reza melanjutkan saat tim melakukan konfirmasi dengan sejumlah tahanan, yang menyebabkan terjadinya pelarian.

Sejumlah tahanan, dia menjelaskan mengakui karena isi hunian di Rutan sudah *over* kapasitas.

Tahanan juga mengakui adanya ketidaknyamanan terhadap perilaku dilakukan oleh beberapa orang petugas Rutan.

“Berdasarkan informasi di sini, tapi info tersebut masih kita kembangkan,” ujarnya menjelaskan.

Meski demikian, Reza mengatakan bahwa kondisi Rutan sudah kembali normal dan kondusif saat Menteri Yasonna Laoly yang memimpin Kemenkumham datang sembari melakukan pemantauan situasi Rutan Sialang Bungkok, Pekanbaru, Riau.

Tahanan sudah diamankan kembali ke blok huniannya masing-masing.

“Selain itu, tahanan ada juga yang dipindahkan ke Lapas maupun Rutan lainnya di Riau,” ucapnya.

# Dibalik Kisah BNN Temukan Isi Sel Mewah Lapas Kelas I Cipinang



Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kelas I Cipinang, Sugeng Hardono mengetahui banyak penemuan sel mewah milik Haryanto Chandra salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan. Berita beredar tidak seperti kejadian sesungguhnya.

Kepala Sub Bagian Humas, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham), Slamet Iman Santoso, menjelaskan mengenai kabar ditemukannya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Haryanto Chandra alias Gombak yang menikmati fasilitas sel mewah, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang dari temuan Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Tim Investigasi dari Itjen Kemenkumham sedang menelusuri kabar itu," ujarnya, Rabu 14 Juni 2017.

Dia menambahkan bahwa Inspektur Wilayah III Itjen Kemenkum-

ham, Juliusman Purba sudah terjun langsung bersama tim investigasi berjumlah 3 orang ke Lapas Cipinang.

Inspektur Wilayah III sudah memerintahkan supaya memeriksa petugas Lapas yang berjaga di Penjaga Pintu Utama (P2U) yang diduga terlibat memberikan fasilitas sel mewah kepada salah satu WBP di Lapas Cipinang itu.

"Tim investigasi akan menyelidiki petugas yang diduga lalai atau terlibat dalam kejadian dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan atau BAP," ucapnya.

Lebih lanjut, tim investigasi akan menanyai semua petugas yang berada di sekitar waktu kejadian, sampai

ditemukan titik temu siapa oknum yang bermain di Lapas Cipinang.

Kemudian hasil dari tim investigasi dilaporkan kepada Pimpinan di Itjen Kemenkumham dan orang nomor satu di Kemenkumham (menteri-red).

Petugas yang terlibat akan diberikan sanksi yang berat. "Dalam setiap penyelidikan belum tentu Kepala Lapas terlibat atas suatu kejadian di dalam Lapas.

Bisa saja ada petugas yang menjadi oknum tidak bertanggung jawab melakukan tanpa diketahui oleh pimpinan Lapas," ujarnya lagi.

Sebelumnya, berdasarkan catatan Kepala Kesatuan Pengaman-



an Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kelas I Cipinang, Sugeng Hardono, menjelaskan bahwa kronologis kabar ditemukannya ruangan sel mewah yang dihuni oleh Haryanto Chandra.

Menurutnya bermula dari kedatangan 4 petugas BNN bersama 2 penyidiknya dengan membawa surat ijin dari Ditjen PAS, melakukan peminjaman narapidana pada Rabu 31 Mei 2017 di Lapas Kelas I Cipinang. "Haryanto alias Gombak," ucapnya.

Sugeng melanjutkan petugas BNN juga melakukan pengecekan di tempat terbuka dan tertutup di Lapas Kelas I Cipinang bersama 6 staff KPLP.

Tim gabungan yang mengecek isi sel Haryanto diketuai oleh Fa-

jar TW anggota penyidik BNN. Tim gabungan menemukan beberapa barang elektronik. "Sejumlah 5 unit HP, 1 unit key BCA, 1 unit laptop bermerek Mac Pro," ujarnya.

Sugeng Hardono, menambahkan tim gabungan tidak menemukan sejumlah uang di dalam sel sebagaimana diberitakan oleh media massa.

Sedangkan kabar mengenai WNA Inggris berinisial CAL sampai saat ini memang tidak ada di Lapas Kelas I Cipinang. Adapun kabar adanya Wi-Fi, Aquarium berisi ikan Arwana masih ditelusuri lebih lanjut.

"Sebab fasilitas yang ada di kamar maupun blok hunian sesuai dengan standar peraturan yang berlaku di Lapas," ucapnya.

Usai terlaksana kegiatan pengecekan isi sel Haryanto tersebut, Sugeng menjelaskan, anggota penyidik BNN lainnya AKP. Chakim langsung melaporkan ke Deputi Pemberantasan BNN, Arman Depari.

Dia menirukan ucapan Chakim yang mengatakan Arman Depari mengapresiasi razia isi sel narapidana di Lapas Cipinang kepada tim gabungan yang berjalan aman dan terkendali.

Menurutnya BNN akan merilis bahwa pengungkapan ini atas kerjasama tim Lapas. "Tapi isi beritanya berbeda," ujar Sugeng agak heran ketika membaca kabar pengecekan Lapas Kelas I Cipinang.



## Revolusi Mental di Lapas Narkotika

*Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berpesan perlu revolusi mental petugas Lembaga Pemasyarakatan.*

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aidir Amin Daud, menghadiri kegiatan Apel Siaga bertema: “KAMI KERJA, PASTI BERSIH MELAYANI” dalam rangka membangun integritas jajaran petugas pemasyarakatan melalui revolusi mental di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta.

Adapun bertindak sebagai Pembina Apel adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.

Dalam Apel Siaga itu memberi instruksi kepada seluruh Kepala Rumah Tah-

anan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk segera memindahkan Anak yang berada pada Rutan dan Lapas.

“Saudara pimpin ke LPKA sebelum tanggal 27 April 2017 dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Divisi Administrasi di wilayah saudara,” tuturnya, Jumat 31 Maret 2017.

Kegiatan Apel Siaga ini juga dilakukan penyerahan anak binaan secara simbolis dari Kepala Lapas Klas IIA Salemba kepada Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA) Jakarta yang disaksikan langsung Direktur Jenderal Pemasyarakatan I Wayan Dusak.

Yasonna Hamonangan Laoly, mengatakan bahwa segenap pimpinan Rutan dan Lapas supaya berjanji, berkomitmen, serta berupaya untuk menaikkan tunjangan kinerja petugas Pemasyarakatan pada umumnya dan menaikkan *grade* petugas P2U, khususnya apabila mampu menghilangkan peredaran narkotika dan penyimpangan lainnya di Rutan dan Lapas,” ujarnya.



## Petugas P2U Kemenkumham Riau Sigap Gagal Lagi Upaya Penyelundupan Sabu

*Gagalnya penyelundupan sabu tersebut berkat tindakan petugas P2U Lapas maupun Rutan sigap*

Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Riau kembali menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) wilayah Kemenkumham Riau.

Sebagaimana aksi petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) menggagalkan penyelundupan sabu ke dalam Lapas Kelas IIA Bengkalis pada Kamis 22 Juni 2017 dan Rutan Kelas IIB Pekanbaru pada Selasa 20 Juni 2017.

“Gagalnya penyelundupan sabu tersebut berkat tindakan petugas P2U Lapas maupun Rutan sigap bekerja,” ujar Humas Kemenkumham Riau, Eki menjelaskan.

Menurutnya kejadian di Lapas Kelas IIA Bengkalis bermula saat petugas P2U memeriksa seorang ibu yang akan membesuk saudaranya salah seorang Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas pada pukul 10.30 WIB.

Lebih lanjut, dalam hasil pemeriksaan ternyata ditemukan 3 paket sabu. Saat ini pengunjung itu langsung diserahkan ke

Satnarkoba Polres Bengkalis. “Untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ucapnya.

Eki melanjutkan kejadian serupa terjadi juga di Rutan Kelas IIB Pekanbaru. Dua petugas pengamanan P2U Rutan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 2 buah paket sabu-sabu yang dilakukan oleh tahanan berinisial V usai pulang dari sidang Pengadilan Negeri Pelalawan, pada pukul 19.45 WIB.

Kronologis bermula dari kedua petugas bernama Husein dan Ridho Hakim yang menerima tahanan yang baru saja pulang sidang dari Pengadilan Negeri Pelalawan berjumlah 23 orang.

Keduanya sesuai dengan Standard Operasional Prosedural dengan memeriksa badan dan barang bawaan tahanan satu persatu.

Petugas berhasil mendapatkan paket sabu-sabu didalam roti dengan kemasan yang tidak rapi seperti biasanya.

Ternyata, roti tawar dengan kemasan yang tidak rapih tersebut terdapat pake sabu-sabu. Selanjutnya, petugas melaporkan kepada Kepala Pengamanan Rutan Kelas IIB Pekanbaru untuk berkoordinasi den-

gan pihak Kepolisian Sektor Tenayan Raya. “Tahanan berinisial V itu membawa sabu ke dalam roti,” ucapnya.

Kemudian tahanan berinisial V itu memberikan keterangan kepada polisi bahwa paket sabu yang ditemukan berasal dari seorang wanita untuk diberikan kepada salah satu tahanan di dalam Rutan.

Maka dari keterangan tersangka petugas mengamankan kembali satu orang narapidana kasus Narkotika hukuman 5 tahun berinisial H.

Petugas saat menggeledah seluniannya menemukan handphone dan mendapatkan keterangan dari H sabu tersebut memang benar miliknya.

Eki menjelaskan modus penyelundupan sabu ke dalam makanan atau paket barang bawaan pengunjung bukanlah cara baru.

Meski begitu, tetapi dibutuhkan insting dan ketelitian pemeriksaan dari petugas yang sedang berjaga.

“Petugas baik di Lapas maupun Rutan harus tetap teliti dalam pengawasan,” ucapnya.

# Kekayaan Intelektual Indonesia Naik di Peringkat Dunia

*Global Inovation Index tahun 2016 yang diterbitkan oleh WIPO terhadap Kekayaan Intelektual, Indonesia berada pada peringkat ke-88. Sebelumnya yang menduduki peringkat ke-97.*

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Aidir Amin Daud, dalam kegiatan Forum Kekayaan Intelektual Nasional dengan mengusung tema “Kekayaan Intelektual untuk Indonesia yang Inovatif” menyampaikan ucapan selamat atas posisi Indonesia yang dipercaya sebagai Chair dalam ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation untuk periode tahun 2017- 2019.

Sebab berdasarkan Global Inovation Index tahun 2016 yang diterbitkan oleh WIPO terhadap

Kekayaan Intelektual, Indonesia berada pada peringkat ke-88. “Dari sebelumnya yang menduduki peringkat ke-97.

Semoga posisi yang diamanahkan ini dapat dijalankan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan,” ujarnya, di Hotel Indonesia

Kempinski Jakarta, Rabu 26 April 2017.

Aidir yang saat ini juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kemenkumham, mengajak kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Kemenkumham) yang menaungi dan menjalani fungsi administrasi serta regulasi bidang Kekayaan Intelektual (KI) untuk dapat terus bekerja, bekerja dan bekerja untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

“Melalui kreativitas dan ino-

vasi berdasarkan kemampuan dan keahlian intelektual yang dimiliki,” tuturnya.

Dalam acara tersebut juga dilakukan beberapa pemberian penghargaan yang diberikan oleh Plt. Dirjen KI kepada pihak terkait, diantaranya penghargaan In-

ternasional Kekayaan Intelektual (WIPO Award) untuk 4 kategori yaitu Medal for Inventors, Medal for Creativity, IP Enterprise Trophy dan Schoolchildren’s Trophy dan juga penyerahan plakat anugerah Kekayaan Intelektual.

Selain itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenkumham dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal.

MoU juga dilakukan antara Kemenkumham dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang izin keimigrasian dan pelayanan terpadu jasa hukum satu pintu.

Adapun adanya penyerahan sertifikat indikasi geografis dan Merek Kolektif Uni Eropa juga diberikan kepada Sawo Sukatali Jawa Barat, Kopi Robusta Empat Lawang Sumatera Selatan, Tenun Ikat Sikka NTT, Duku Komering Sumatera Selatan, Kopi Arabika Kerinci Jambi dan Kopi Arabika Gayo.







## Menkumham: Pegawai Unit Kerja Lingkungan Kemenkumham Bekerjalalah Dengan Berinovasi!

*Menkumham menjelaskan paradigma pembinaan memang sudah diharuskan bergeser.*

“Selamat Hari Bhakti Pemasyarakatan yang ke-53 dan selamat ulang tahun kepada insan-insan Pemasyarakatan di seluruh penjuru tanah air. Dirgahayu Pemasyarakatan, Sarwo hayu ingkang ketemwan, semoga kebahagiaan yang selalu ditemui, dan Indonesia selalu menanti dharma bhaktimu,” ucap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly ketika menjadi Inspektur Upacara, pada hari Bhakti Pemasyarakatan ke-53, di Lapangan Upacara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kamis 27 April 2017.

Yasonna mengatakan di tengah-tengah kritikan kepada Kemenkumham atas kinerjanya. Saat ini dalam perjuangan di Hari Kartini, Ibu yang membuka mata untuk merubah paradigma tujuan dapat dicapai oleh perubahan.

Orang yang tidak mau merubah, tidak ada kemajuan. Kemajuan dicapai dengan adanya inovasi.

Menkumham pun mengajak para undangan mulai dari Inspektur Jenderal Menteri-

an Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham), Aidir Amin Daud Pimpinan, serta jajaran Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, dan Petugas Pemasyarakatan di lingkungan unit kerja Kemenkumham untuk melakukan perubahan kinerja. “Mari berlomba-lombalah berinovasi,” tuturnya.

Upacara bertema: “Kami Kerja Nyata, PASTI Bersih Melayani” itu mengabarkan bahwa saat ini telah ditetapkan dan dibangun beberapa industri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mulai dari manufaktur, percetakan, olahan makanan, dan penggemukan sapi.

Menkumham menjelaskan paradigma pembinaan memang sudah diharuskan bergeser, bukan lagi sekedar memberi keterampilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Melainkan berilah keterampilan yang mengarah kepada pembinaan yang produktif dalam wujud pembangunan industri di Lapas.

Yasonna juga mengajak para hadirin dan seluruh jajaran

Pemasyarakatan untuk melakukan introspeksi diri dan segera bergerak melakukan pembenahan dengan kata kunci komitmen. Hal itu menurutnya akan menjadi pondasi dan benteng dalam mengaplikasikan niat baik untuk melakukan pembenahan diri.

Di sela-sela upacara, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dengan Ikatan Arsitek Indonesia, Universitas Budi Luhur, Bank Negara Indonesia, Yayasan JEERA, Yayasan Indonesia Biru, Yayasan Koreksi, Daya Kreasi Revolusi.

Ada pula penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dengan Badan Kepegawaian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Ikatan Pencak Silat Indonesia.

Kemudian dilanjutkan kegiatan penyerahan piagam penghargaan kepada pegawai berprestasi, mulai dari Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Lapas, dokter, perawat, hingga Jabatan Fungsional Umum yang bertugas di UPT Pemasyarakatan.

Menkumham, diakhir sambutannya memberikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan.

“Saya mengucapkan tingkatkan kinerja saudara, berikan pengabdian yang terbaik,” pesannya.



## Rekor Dunia Kegiatan Membaca Al-Quran Kemenkum-

*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencetak rekor dunia. Museum Rekor Indonesia mencatat karena kegiatan membaca Al-quran sampai khatam oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.*

Ketua Museum Rekor Indonesia (MURI) Jaya Suprana, memberikan penghargaan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk kegiatan serentak membaca Khatam Al-Quran oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia, Kamis 20 April 2017.

MURI mencatat hampir sekitar 57.360 orang WBP membaca Al-Quran secara bersama-sama sampai dengan selesai 30 Juz alias Khatam membaca Al-Quran.

“Belum pernah ada di planet bumi ini, begitu banyak dan secara serentak Narapidana melakukan membaca Al-Quran secara bersama-sama dan ini untuk yang kedua kalinya Kemenkumham melakukannya,” ucap Ketua MURI.

Dirjen Pemasyarakatan, I Wayan K Dusak menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh Lapas dan Rutan se-Indonesia sebanyak 478 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Adapun tiap UPT membentuk kelompok yang terdiri dari 120 orang sebagai pembaca utama untuk mengkhataamkan 30 Juz. “Sehingga total qori sebanyak 57.360 orang,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly dalam sambutannya mengatakan ingin kepada seluruh WBP maupun jajarannya serta tamu undangan yang hadir, kegiatan ini bukanlah kegiatan seremonial semata.

Melainkan harus terus dilaksanakan setiap hari agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Sebab menurutnya kegiatan ini sebagai sarana introspeksi diri

serta momentum untuk kembali mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu berdoa dan berupaya meningkatkan kualitas ibadah kita. Agar kita kembali menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan pemberian penghargaan rekor MURI Khatam Al-Qur’an ini diberikan oleh ketua MURI melalui Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kepada Menkumham, Dirjen Pemasyarakatan, serta perwakilan WBP, ditetapkan dan dicatat bukan hanya dalam lingkup Indonesia saja, tetapi juga dalam lingkup Dunia.

“Rekor ini saya berikan bukan hanya tercatat di Indonesia saja, tetapi juga tercatat dalam Rekor Dunia,” Jaya Suprana menjelaskan disambut dengan tepuk tangan yang meriah oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kegiatan khatam Al-Qur’an ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan menyambut hari Bhakti Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke-53, yang puncak pelaksanaannya akan diselenggarakan pada 27 April 2017, serta menyongsong hari raya Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW.

Kegiatan khatam Al-Qur’an yang dipusatkan pada Rutan Negara Klas I Cipinang dihadiri oleh sejumlah Menteri diantaranya Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pemuda dan Olahraga, Ketua MURI, Anggota DPR-RI, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Inspektur Jenderal Kemenkumham, serta beberapa tamu undangan lainnya.

## Ada Barcode di Paspor Warga Negara Asing



Direktorat Jenderal Imigrasi membangun sistem baru pengawasan orang asing dengan bar-

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aidir Amin Daud, dengan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, mengikuti kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI.

Dalam RDP tersebut membahas perihal pengawasan orang asing yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kamis 19

Januari 2017.

Yasonna, menjelaskan, bahwa Ditjen Imigrasi berencana akan membangun sebuah sistem baru yang didalamnya akan mengatur mekanisme pengawasan orang asing.

Selain itu dapat dibaca melalui sistem *barcode* pada stiker yang direkatkan pada paspor WNA saat datang ke Indonesia.

Maka dengan sistem itu juga akan membantu Tim Pengawasan Orang Asing dari Ditjen Imigrasi melakukan pengawasan dan mengetahui keberadaan serta

jumlah orang asing yang melakukan kunjungan maupun menetap di Indonesia.

“Selain pembahasan sistem yang akan di bangun oleh Ditjen Imigrasi, pembahasan penambahan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Senin 9 Januari 2017.

## Kisah Mel Fisher Acuan Bekerja Pegawai Kemenkumham

*Kisah Tak Pernah Menyerah Mel Fisher Menjadi Inspirasi Bekerja Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Day Is Today And Day Is Tomorrow!*



“Di dalam diri manusia ada suatu harta karun yang terpendam yang harus dicari dan digali”, pesan yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Irjen Kemenkumham), Aidir Amin Daud, saat bertindak sebagai Inspektur apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai dilingkungan Unit Pusat Kemenkumham, di lapangan merah gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Senin 9 Januari 2017.

Kutipan kalimat diatas bersumber dari sebuah kisah seorang pencari harta karun yang beken, Mel Fisher dari Florida.

Mel Fisher adalah seorang pemimpin yang visioner, legendaris, dan merupakan seorang pemburu harta karun terbesar di dunia, sekaligus juga pengusaha yang menjual seluruh bisnisnya untuk membiayai proyek gila mencari harta karun di Nuestra Senora de Atocha dan Santa Margarita.

Harta karun yang tenggelam selama badai pada tanggal

6 September 1622, di kawasan Key West, Florida. Mel Fisher melakukan tindakan yang orang lain tidak banyak melakukannya.

Dia menyadari mimpinya akan selalu datang selama hidupnya.

Setiap hari dia selalu berprinsip pada sebuah motto, “*Day Is Today And Day Is Tomorrow!*” yang menginspirasi pada pencarian harta karun.

Demi menjaga mimpi, dia banyak menderita kerugian pribadi. Maklum saja, sebab selama

16 tahun dalam pencarian harta karun. Dia berujung harus menghadapi 100 perkara di pengadilan yang berakhir dengan kemenangan di Mahkamah Agung AS.

Hari demi hari, bulan ke bulan, sampai belasan tahun, Mel Fisher tak mendapatkan hasil apa-apa dari pencarian harta karunnya, tapi ia tak pernah menyerah.

Dia tetap memegang teguh pada prinsipnya yaitu: “*Day Is Today And Day Is Tomorrow The*

*Day!*”.

Setelah belasan tahun Mel Fisher mencari harta karun, akhirnya dia menemukan tumpukan batangan perak, peti koin harta, emas, perhiasan, dan artefak yang unik dari *Nuestra Senora de Atocha*, “*Mother Atocha Lode*”, bertepatan pada tanggal 20 Juli 1985.

Mel Fisher bersama tim investornya yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun itu, akhirnya mendapatkan harta karun yang diburunya, kemudian mencapai pada kesuksesan.

Dari cerita diatas, Irjen Kemenkumham mengajak kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkumham, untuk selalu yakin dan pantang menyerah dalam meniti sebuah pekerjaan.

Walau terdapat banyak hambatan, yang nantinya akan menemukan sebuah kesuksesan. Semua berharap dalam perjalanan hidup ini, kedepannya akan lebih baik lagi.

## Saya Pancasila, Saya Indonesia

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Widodo Ekatjahjana, membacakan Sambutan Presiden RI dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945–1 Juni 2017. Pidatonya menyerukan saya Pancasila, saya Indonesia.



Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Widodo Ekatjahjana, membacakan Sambutan Presiden RI dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945–1 Juni 2017 yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kamis 1 Juni 2017.

“Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita Indonesia. Kita Pancasila. Semua Anda Indonesia, semua Anda Pancasila. Saya Pancasila, saya Indonesia,” ujarnya saat itu selaku Inspektur Upacara.

Widodo menjelaskan bahwa Pancasila yang dipidatokan Ir. Sukarno merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila pada 1 Juni 1945, lalu Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila pada 18 Agustus 1945.

Adalah sebagai jiwa besar para founding fathers, para ulama, dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara.

Sehingga membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Dan tercantum pada paragraf ke-4 pembukaan Undang-undang Dasar 1945,” tuturnya.

Widodo menjelaskan, walau terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap.

Menurutnya Presiden Joko Widodo telah menetapkan pada

tanggal 1 Juni adalah Hari Lahir Pancasila ditetapkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila di Jakarta.

“Saya mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila,” ucapnya.

Menurutnya seluruh anak bangsa harus menyatukan hati, pikiran, dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan.

Selain itu, harus kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong dan toleran, serta kita harus menjadikan Indonesia bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat di mata internasional.

“Kita juga harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila,” tuturnya.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan ini dalam sambutan penutupnya mengajak supaya saling menjaga rasa persatuan dan persaudaraan sesama anak bangsa.

Seturut, saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa.

“Mari kita saling bahu-membahu dan bergotong royong demi kemajuan Indonesia,” ucapnya menuturkan



## Mudik Bersama Keluarga Besar Kemenkumham

Beberapa hari memasuki Hari Raya Idul Fitri 1438 H. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar kegiatan Mudik Bersama Keluarga Besar Kemenkumham.



Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Irjen Kemenkumham), Aidir Amin Daud beserta Pimpinan Tinggi lainnya serta Pegawai Kemenkumham mendampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly melakukan pelepasan mudik bersama keluarga besar Kemenkumham di Lapangan Upacara Kemenkumham, setelah Apel Sore selesai, Kamis 22 Juni 2017.

Menkumham menjelaskan dengan adanya kegiatan mudik bersama ini. Para pegawai dapat berkumpul dengan keluarga tercinta. Sehingga aura kebahagiaan yang dirasakan adalah bentuk suka cita saudara-saudara kaum muslim yang telah menjalankan puasa hampir sebulan penuh.

Yasonna melanjutkan sebelum berangkat mudik, pegawai supaya menjaga ketertiban dan kenyamanan selama perjalanan. Lalu persiapkan obat, makanan, dan minuman untuk mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi.

“Bagi yang mabuk dalam perjalanan darat. Silahkan membeli obat antimo,” ucapnya kepada peserta mudik pada saat Apel Sore itu.

Tidak hanya itu saja, Yasonna juga berpesan kepada

pengemudi bus berhati-hati dalam menjalankan kendaraan. Menurutnya hindari mengemudi dengan kebut-kebutan.

Adapun untuk meminimalkan kopi yang banyak. Sebab supaya tidak mengantuk saat membawa kendaraan. “Karena keselamatan berada di tangan para supir dan kenek yang membantu untuk memuluskan perjalanan ini,” tuturnya.

Menkumham menambahkan kepada seluruh pegawai selamat menjalankan cuti bersama dengan keluarga tercinta dan sampaikan salam hangat kepada keluarga di kampung halaman.

Lebih lanjut, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly mewakili jajaran Pimpinan Kemenkumham mengucapkan, “Selamat merayakan Idul Fitri 1 Syawal

1438 H, Minal Aidin Wal Fa Idzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin,” ucapnya.

Sementara itu, Mochamad Kristanto selaku Jabatan Fungsional Umum di Itjen Kemenkumham, mengucapkan terima kasih kepada Menkumham yang telah mengadakan kegiatan Mudik Bersama Keluarga Besar Kemenkumham ini.

Sebab menurutnya tidak lagi perlu pusing memikirkan transportasi untuk mudik. “Kegiatan ini dapat membantu kepolisian karena mengurangi kendaraan pribadi yang pada mudik,” ucapnya.

“Semoga tahun-tahun ke depan akan dilaksanakan kembali mudik bersama ini dengan rute yang lebih banyak lagi,” ujarnya lagi seraya berharap.





## BPK Audit Laporan Keuangan Kemenkumham

Pagu anggaran Kemenkumham tahun 2016 sebesar Rp. 11,6 Triliun. Terealisasi sebesar Rp. 10,6 Triliun dan telah dilakukan penyerapan sebesar 91,29%.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima tamu kehormatan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Kedatangan Tim BPK tersebut dalam rangka melakukan audit laporan keuangan Kemenkumham tahun 2016.

Inspektur Jenderal, Aidir Amin Daud dan Sekretaris Jenderal, Bambang Rantam Sariwanto beserta beberapa pejabat pengelola keuangan lainnya mendampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly yang berlangsung pada Rabu 18 Januari 2017.

Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, berpesan

kepada seluruh jajarannya untuk bekerja lebih sungguh-sungguh lagi, terutama terhadap laporan keuangan ketika mendengar laporan yang disampaikan Sekjen Kemenkumham.

"Jangan hanya memperhatikan masalah penyerapan keuangannya saja, melainkan pertanggungjawabannya harus 100%, itu berarti kita harus bersungguh-sungguh lagi dalam bekerja dan mengelola keuangan," ujarnya kepada seluruh jajaran petinggi.

Dalam laporan Sekretariat Jenderal Kemenkumham mengenai realisasi keuangan Kemenkumham tahun 2016, yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal, Bambang Rantam Sariwanto, menjelaskan bahwa pagu angga-

ran Kemenkumham tahun 2016 adalah sebesar Rp. 11,6 Triliun, dan telah terealisasi sebesar Rp. 10,6 Triliun.

"Telah dilakukan penyerapan sebesar 91,29%," ucapnya.

Sementara itu, anggota I BPK RI, Agung Firman Sampurna, menjelaskan bahwa jika Kemenkumham bekerja dengan sungguh-sungguh.

Maka dari BPK juga akan bekerja untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham dengan sungguh-sungguh.

"BPK memiliki peran untuk mengaudit laporan keuangan Kementerian/Lembaga di Indonesia," ujarnya.

## Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang Berkunjung ke Inspektorat Jenderal



Empat puluh lima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang berkunjung ke Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Puluhan mahasiswa itu ingin mengetahui lingkup kerja dari Kemenkumham dalam kewenangannya.

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima kunjungan mahasiswa dari jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada Selasa 7 Maret 2017.

Kedatangan ke-45 mahasiswa itu dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa yang sudah memasuki masa penyusunan tugas akhirnya (skripsi).

Sekaligus ingin menambah wawasan di bidang penegakan hukum. "Kami merasa bangga atas kedatangan para generasi penerus bangsa dan calon-calon pemimpin negeri ini," ucap Inspektur Jenderal, Aidir Amin Daud, saat memberikan sambutannya.

Empat puluh lima mahasiswa tersebut dalam pertemuannya ke Inspektorat Jenderal Kemenkumham bertujuan ingin mengetahui lingkup kerja dari Kemenkumham dalam kewenangannya.

Sebagaimana dijelaskan secara gamblang oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Luluk Ratnaningtyas dan beberapa Inspektur Wilayah yang mendampingi.

"Kemenkumham menjalankan tugas fungsinya sebagai penyelenggara negara yang membantu Presiden dalam mengurus bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia," ujarnya saat memberikan materi paparannya tentang gambaran umum, kewenangan serta tugas dan fungsi dari Kemenkumham.

Mahasiswa UMM tersebut didampingi oleh wakil dekan dan dosen pembimbing. Sebelumnya, rombongan telah melakukan kunjungan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan hal yang sama.

Mereka mempunyai rencana dalam 4 agenda kegiatan kunjungan yaitu ke KPK, Kemenkumham, Komisi Yudisial (KY), serta Mahkamah Konstitusi (MK).

Kunjungan ini diharapkan mereka mendapatkan gambaran tentang tugas dan fungsi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Khususnya dibidang penegakan hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan tugas akhir mereka.

## Menkumham dan Komisi III DPR Rapat Soal Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan



Menteri Yasonna Hamonangan Laoly bersama komisi III DPR membahas over kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aidir Amin Daud, beserta Pimpinan Tinggi Madya dan Para Pimpinan Tinggi Pratama mendampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly pada kegiatan Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di gedung Nusantara II Paripurna lantai 1 DPR RI Jakarta, 10 April 2017

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III, Bambang Soesatyo didampingi para anggota Dewan Kehormatan Komisi III DPR RI.

Komisi III DPR RI mende-

sak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk menyelesaikan permasalahan di bidang Pemasyarakatan. Yakni dengan melakukan reformasi politik hukum dan pola penegakan hukum.

Serta dukungan regulasi untuk dapat segera mengurangi angka over kapasitas di berbagai LP/Rutan.

Menkumham menegaskan bahwa, data yang di dapat per Januari 2017 sebesar 202.406/jiwa. "Jika dibiarkan terus menerus begini setiap LP/Rutan akan semakin berat di bagian petugas pengamanannya," tegas Yasonna.

Tidak hanya di bidang Pemasyarakatan, Komisi III DPR RI juga mendesak Menkumham supaya bidang Keimigrasian untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing terutama dalam mencegah dan menindak Tenaga Kerja Asing dan Pebisnis Asing Ilegal di berbagai daerah atau wilayah.

"Terutama dari sisi kepentingan nasional dan prinsip resiprositas untuk nantinya dilaporkan dalam rapat kerja selanjutnya," ucap Bambang Soesatyo.

## Itjen Kemenkumham Entry Meeting dengan BPK

Inspektorat Jenderal Kemenkumham sebagian besar sudah melakukan pemantauan atas rekomendasi tindak lanjut temuan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan status pembebanannya.



Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham) menerima Tim dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk melakukan entry meeting terkait pemantauan tindak lanjut temuan BPK dan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian Negara yang dilakukan di ruang rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal lantai 16 Kuningan Jakarta Selatan.

"Kegiatan tersebut dihadiri oleh pejabat dan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan Kemenkumham serta Tim Pemantauan TL dari BPK RI," ucap Kepala Bagian Program Humas dan Pelaporan, Itjen Kemenkumham, Joko Martanto, Senin 12 Juni 2017.

Lebih lanjut, berdasarkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2016. Kemenkumham telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 496 rekomendasi.

Hal itu belum sesuai rekomendasi (dalam proses tindak lanjut-red) sebanyak 158 rekomendasi.

Selain itu, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 95 rekomendasi serta terdapat 34 kasus kerugian negara yang telah ditetapkan pembebanannya dan 29 status Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang belum ditetapkan status pembebanannya.

"Inspektorat Jenderal Kemenkumham sebagian besar sudah melakukan pemantauan atas

rekomendasi tindak lanjut temuan BPK dan TGR," ujar Khairuddin sebagai Plh. Inspektur Jenderal.

Wakil Ketua Tim BPK, Iwan Gunawan mengatakan oleh karena itu rekomendasi atas temuan BPK harus segera ditindaklanjuti selama 60 hari.

Sebab jika sudah ada yang ditindaklanjuti, dia mengimbau, untuk segera diinput pada Aplikasi SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) Temuan BPK oleh inputer. "Dan divalidasi oleh admin pada Inspektorat Jenderal Kemenkumham," ujarnya.



## Irjen Kemenkumham: Jangan coba-coba berbuat curang!

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aidir Amin Daud berpesan supaya Rencana Kerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2018. Hal yang perlu diperhatikan adalah pertanggungjawaban pengelolaan

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Aidir Amin Daud diundang sebagai narasumber dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) membahas Rencana Kerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2018.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kemenkumham mengundang sejumlah Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham, di ruang rapat Oemar Seno Adji, lantai 18 Kuningan Jakarta Selatan, Senin 8 Mei 2017.

Irjen Kemenkumham menyampaikan dalam FGD, bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang tidak diperkenankan.

Antara lain, semena-mena menggunakan atau menghabiskan anggaran, menghabiskan anggaran secara maksimal namun tidak berkualitas, belanja operasional untuk belanja modal, *mark up* pengeluaran belanja barang, belanja dengan meminta nota kosong dan mengisi sendiri nilainya, membuat sendiri stempel toko atau penyedia.

“Dan pengeluaran melampaui standar biaya keluaran,” tuturnya berpesan.

Aidir juga memberikan



contoh pada salah satu Kementerian yang ia pernah sambangi.

Dia melihat ada tulisan besar, bekerja cepat dan jangan mempersulit orang. “Artinya, apapun urusannya jangan mempersulit orang lain,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, menurutnya ada beberapa hal lagi yang tidak diperkenankan, yaitu pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif, *mark up* tiket perjalanan dinas dan biaya hotel.

Kemudian menyusun HPS tidak didasarkan survey dan tidak

dapat dipertanggungjawabkan, transport dalam kota dibayarkan kepada peserta atau panitia yang berasal dari tempat penyelenggara, mempertanggungjawabkan tiket perjalanan dinas dari bukan maskapai penerbangan yang digunakan yang dilaksanakan dalam jam kantor, pertanggungjawaban keuangan tidak melalui PPK.

“Jangan coba-coba membuat tiket fiktif. BPK sudah mempunyai alat yang canggih,” tutur Aidir mewanti-wanti.



## Hasil Rakornas Tim Unit Pemberantasan Pungutan

Terkait kegiatan Tim UPP Saber Pungli. Kantor Wilayah Kemenkumham baru melaporkan Laporan Bulanan Sampai bulan Februari 2017.

Sekretariat Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan rapat persiapan rapat koordinasi nasional (rakornas) UPP di ruang rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham Gedung Ex. Sentra Mulia Lantai 16 Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa 30 Mei 2017.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Luluk Ratnaningtyas selaku Sekretaris I UPP Kemenkumham didampingi oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Indro Purwoko, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Agus Nugroho Yusup, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu, serta dihadiri oleh Perwakilan Tim UPP Kemenkumham.

“Berdasarkan usulan tim UPP Kemenkumham, ada 3 tempat untuk pelaksanaan rakornas nanti, antara lain di Jawa Timur, Jawa Barat atau di Jakarta dan akan disampaikan kepada Ketua UPP untuk memutuskan tempat pelaksanaannya,” ucap Luluk.

Maka berdasarkan data dari UPP Inspektorat Jenderal Kemenkumham, bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham baru melaporkan Laporan Bulanan Sampai bu-



lan Februari 2017 terkait kegiatan Tim UPP Saber Pungli. Sehingga dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2017.

Tim UPP Kantor Wilayah Kemenkumham belum ada lagi yang melaporkan Laporan Bulanan tersebut.

Menurut Luluk untuk Laporan Bulanan UPP Saber Pungli Kantor Wilayah masuk dalam Program Aksi Kemenkumham. Akan tetapi, Tim UPP Kantor Wilayah baru melaporkan laporan bulanan sampai bulan Februari 2017.

Sehingga dari bulan Maret

sampai dengan bulan Mei 2017 tidak ada catatan laporan. “Belum ada laporan bulanan UPP Kantor Wilayah,” tambahnya.

Sementara itu, Indro menyampaikan bahwa kegiatan ini yang penting adalah harus betul-betul disiapkan apa yang akan dicapai nanti.

Shingga setelah kegiatan ini tidak lewat begitu saja, tidak hanya sekedar ceramah. Melainkan harus difokuskan sesuai dengan tujuan kegiatan ini. “Sehingga output yang dihasilkan dari kegiatan ini harus diprioritaskan,” ujarnya.



## Prinsip Bekerja STMJ Pegawai Kemenkumham



*Sadar, Teguh, Mampu, dan Jujur prinsip dalam bekerja pegawai Kemenkumham.*

**S**ekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi (Kemenkumham), Luluk Ratnaningtyas saat menjadi pembina apel sore di Gedung Kemenkumham berpesan, kepada pegawai pada Unit Pusat Kemenkumham bahwa ada dua manfaat jika mengikuti kegiatan apel.

Menurutnya yang pertama untuk melatih kedisiplinan dan yang kedua mempererat tali silaturahmi. “Dalam kita bekerja, harus berprinsip pada STMJ (Sadar, Teguh, Mampu, dan Jujur),” ujarnya, 13 Januari 2017.

Hal ini dimaksudkan bahwa di dalam bekerja harus Sadar akan pekerjaan, Teguh dalam

menjalankan amanah, Mampu mengerjakan tugas yang di berikan, serta Jujur dalam bekerja.

“Prinsip bekerja STMJ Pegawai Kemenkumham,” ujarnya



## Tes CAT, Syarat Mengangkat Pejabat Administrasi

*Tes Computer Assisted Tes (CAT) adalah solusi memilih pegawai untuk diangkat menjadi pejabat struktural maupun pejabat fungsional di Kemenkumham.*

**I**nspetktor Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Aidir Amin Daud mengatakan bahwa Inspektorat Jenderal Kemenkumham memiliki sistem transparansi yang jelas untuk pengangkatan pegawai melalui Tes Computer Assisted Tes (CAT).

Sehingga tidak ada lagi terjadi pegawai titipan-titipan yang diangkat menjadi pejabat struktural maupun pejabat fungsional di Kemenkumham.

“Guna terwujudnya lingkungan kerja yang kondusif, transparan, akuntabel dan didukung penerapan reward dan punishment,” ujarnya, Senin 3

April 2017.

Menurutnya untuk pemilihan Jabatan Administrasi (Eselon IV) dilakukan secara cermat dan seksama dengan mempertimbangkan kompetensi dan unsur Tes CAT (Computer Assisted Tes) yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Negara, maupun yang dilaksanakan di BPSDM Kemenkumham.

Dimana Tes CAT merupakan bentuk implementasi penilaian yang secara obyektif dalam menghindari keraguan dalam mengambil keputusan.

Selain itu, dia berharap kepada pegawai yang dilantik untuk bekerja dengan baik, mengemban amanah dengan baik, mam-

pu memberikan kontribusi yang baik, dan mampu menjadikan Inspektorat Jenderal sebagai satuan kerja terdepan penegakan integritas dan pemberantasan korupsi.

Lebih lanjut, diakhir amanatnya, Inspektur Jenderal mengatakan, bagi yang belum diangkat harus bersabar. Sebab semua sudah ada jalannya. “Karena semua itu sudah diatur oleh Maha Menentukan,” tuturnya.

Maka, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor SEK-16.KP.03.03 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Inspektur Jenderal Kemenkumham melantik 9 orang untuk Jabatan Administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenkumham yang bertempat di ruang Town Hall Inspektur Jenderal Lantai. 16 Gedung. Ex. Sentra Mulia Kuningan.

Pelantikan tersebut disaksikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Luluk Ratnaningtyas, dan Inspektur Wilayah V, Siti Honiyah, serta di hadir oleh pejabat dan pegawai lainnya lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenkumham.



## Pejabat Tinggi Dipilih Secara Transparansi Tidak Ada Intervensi



*Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aidir Amin Daud mengajak para pegawai untuk meningkatkan disiplin dalam bekerja. Dan untuk pengembangan karir pegawai kementerian benar-benar transparan, tidak ada intervensi.*

Orang-orang berseragam biru-biru itu ramai berkumpul di lapangan merah gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengikuti kegiatan apel pagi.

Mereka adalah pegawai dari beragam unit kerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Senin 27 Maret 2017.

Upacara apel pagi itu dipimpin oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Inspektur Jenderal, Aidir Amin Daud selaku Inspektur Apel dan Auditor Muda Ricky Ardiles selaku Komandan Apel.

Inspektur Apel mengatakan kepada pegawai yang mengikuti upacara bangga atas antusias pegawai yang mulai menyadari akan pentingnya kegiatan seperti apel pagi.

“Kalau saya potret dari sini jumlah pegawai yang hadir kali ini cukup banyak dari biasanya. Dan itu berarti mindset kita sudah mulai berubah. Saya bangga kepada saudara-saudara karena mau melakukan perubahan itu” ucapnya.

Menurutnya pegawai di Kemenkumham harus menyadari makna dari mengikuti kegiatan apel Inspektur Jenderal Kemenkumham dalam upacara apel bukan hanya berbicara untuk mengajak meningkatkan disiplin pegawai dalam bekerja.

Dia juga menjelaskan mengenai hal pola pengembangan karier. Menurutnya dalam pemilihan pejabat tinggi di Kemenkumham juga telah melakukan pelaksanaan *open bidding* yang

benar-benar transparan dan tidak ada intervensi masa pengembangan karir.

“Saudara-saudara harus yakin akan masa depan saudara dan kita berharap perjalanan kita kedepan akan lebih baik lagi,” ujarnya.

Sebelum menutup upacara apel pagi, dia berpesan kepada seluruh peserta apel bahwa harus mampu secara perlahan-lahan mau merubah pola pikir dan yakin bahwa semua orang akan datang masanya dalam memimpin suatu lembaga.

“Semua orang akan datang masanya, dan semua masa akan diisi oleh orang yang dipilih dalam masa itu,” Aidir menjelaskan.

## Pengawasan Kinerja Lewat Aplikasi SIMWas

*Aplikasi SIMWas sudah bisa diakses dan di input dengan cepat. Cara aksesnya dapat dari PC, Laptop, maupun Smartphone.*



Inspektorat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah membangun suatu sistem aplikasi baru yang bernama Sistem Informasi Manajemen Pengawasan atau biasa disebut SIMWas.

Sebagaimana Luluk Ratnaningtyas Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham, menjelaskan bahwa aplikasi ini sejak 2008 telah banyak mengalami pembaharuan dan pengembangan.

Hal itu, menurutnya demi satu tujuan yang ingin dicapai, yaitu memberikan pelayanan suatu sistem pengelolaan hasil pengawasan yang efektif, efisien, cepat, dan akurat.

“Aplikasi SIMWas saat ini sudah bisa diakses dan di input dengan cepat, bisa dari PC,

Laptop, maupun Smartphone melalui jaringan internet, cukup 10 menit,” tuturnya, di Gedung Auditorium Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Senin 3 April 2017.

Aplikasi SIMWas, dia kembali menjelaskan, selain dapat mempercepat proses tindak lanjut hasil pengawasan, juga dapat pengambil keputusan/ kebijakan pimpinan segera mungkin.

Adapun beberapa kegunaannya adalah pertama menghasilkan standarisasi untuk penyusunan perencanaan pengawasan, kedua memberikan informasi tentang sumber daya (tenaga, dana, dan waktu) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Ketiga menyajikan hasil kinerja aparat pengawasan fungsional baik secara intern maupun



ekstern, keempat menghindari kemungkinan duplikasi pekerjaan, tumpang tindih kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern dengan aparat pengawasan ekstern, dan mengurangi resiko kesalahan input data.

“Kelima, aplikasi ini untuk memperkuat fungsi pengawasan melekat dan komunikasi atau koordinasi horizontal antar bidang pengawasan,” tuturnya.



# Aplikasi SIPTL BPK Meningkatkan Penyelesaian Data Tindak Lanjut

*Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK dapat meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tepat, mudah dan dapat dipantau secara sistematis.*



Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Aidir Amin Daud mengundang pejabat dan pegawai dari unit eselon I kegiatan Workshop Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK.

Menurutnya, kepada unit eselon yang belum menyelesaikan data tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) untuk segera dapat menyelesaikan dan tindaklanjutnya dengan baik.

“Untuk data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK akan dilaporkan secara manual dan akan digantikan dengan data elektronik melalui sebuah sistem yang berbasis *web* oleh BPK,” ujarnya.

Sehingga proses dan status tindak lanjut dari data yang

disampaikan oleh entitas dapat diketahui dan diakses secara real time. “Workshop ini, diharapkan dapat meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tepat, mudah dan dapat dipantau secara sistematis serta hambatan-hambatan penyelesaian dapat dicarikan solusinya,” tuturnya.

Kepala Sub Direktorat Eval-

uasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja BPK, Sulung Setio Am-boro menambahkan bahwa Aplikasi SIPTL merupakan suatu media atau alat bagi Kemenkumham untuk (wajib) menindaklanjuti yang direkomendasikan oleh BPK dengan cepat dan tepat.

“Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 tahun 2017 bahwa APIP merupakan salah satu unit

yang bermitra dengan BPK dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Sulung menambahkan, aplikasi ini masih akan dikembangkan lebih lanjut, khususnya kebutuhan informasi yang diperlukan.

Maka bila ada kebutuhan dari Kementerian atau Lembaga terkait atas tindak lanjut dapat menghubungi BPK.

Sedangkan menurut Pemeriksa Muda BPK, Farid Bintoro Aji, mengatakan Aplikasi SIPTL berbasis *online* yang akan dikembangkan oleh BPK ini dapat diakses dimanapun asalkan ada internetnya.

Badan Pemeriksa Keuangan sesuai UU melaksanakan tugas dan fungsi dalam melakukan pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjutnya.

Sampai dengan semester II Tahun 2016, informasi tindak lanjut temuan BPK kepada Kemenkumham adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 496 rekomendasi 66,31% senilai Rp.53.895.374.302,-
2. Yang belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 157 rekomendasi 20,99% senilai Rp. 170.164.367.295,-
3. Belum di tindaklanjuti sebanyak 95 rekomendasi 12% senilai Rp. 1.948.338.305,-

Maka berdasarkan informasi tindak lanjut temuan BPK kepada Kemenkumham, yang belum sesuai rekomendasi masih ada sekitar Rp 170 Miliar dan masih ada sekitar 25% lagi.

## Irjen Kemenkumham: Saya mengingatkan, jangan melakukan korupsi walupun satu rupiah !

*Pengelola ULP adalah pejuang-pejuang tangguh. Dan harus kerja baik, kerja jujur, Stop KKN, dan bertindak manipulasi.*

Ruang Control Room lantai 19 gedung Ex Centra Mulia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kuningan Jakarta Selatan, menjadi saksi Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aidir Amin Daud, melakukan percakapan melalui media telekomunikasi jarak jauh atau *teleconference*.

Dia mengajak kepada seluruh peserta Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk menghindari resiko yang berpotensi kepada tindakan kecurangan yang diselenggarakan oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI di Hotel Mercure, Bandung-Jawa Barat, 21 Maret silam.

“Saya mengingatkan, jangan melakukan korupsi walupun satu rupiah pun,” ucapnya bernada tegas, Rabu 22 Maret 2017 melalui *teleconference*. Pengelola ULP menurutnya adalah pejuang-pejuang tangguh.

Maka itu, dia mengajak semua ULP untuk mulai dari sekarang harus kerja baik, kerja jujur, Stop KKN, dan bertindak manipulasi. Sebab dalam pelaksanaan pengadaan, ULP berpotensi rawan menerima pungli.



Irjen Kemenkumham juga memberikan gambaran tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih oleh Kemenkumham dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

“Kemenkumham semisal dapat meraih juara berkali-kali dari Kementerian Keuangan dari sisi penyerapan anggaran, pengelolaan PNBP, maupun pengadaan barang dan jasa,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto mengatakan memberi apresiasi kepada pengelola ULP yang memiliki peran yang sangat berat.

Dia melanjutkan ULP harus dapat mengelola sistem pengadaan dengan baik.

“Yang menjadi perhatian penting adalah pengelola ULP harus paham betul apabila terjadi deviasi. Itu akan menjadi sebuah persoalan bagi kita sampai kepa-

da *punishment*,” ujarnya sembari mengingatkan kepada peserta rapat.

Merujuk dari Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa.

Pemerintah menyatakan bahwa kepala ULP/anggota kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan harus memenuhi beberapa persyaratan.

Di antaranya adalah memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/kelompok kerja ULP atau pejabat pengadaan yang bersangkutan, memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang atau jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, dan yang terpenting adalah memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

## Deklarasi Janji Kinerja Pegawai Kemenkumham



*Pegawai di Kemenkumham harus melakukan inovasi dan menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat.*

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly melaksanakan kegiatan Apel Deklarasi Janji Kinerja diikuti oleh seluruh pegawai di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kegiatan Apel Deklarasi Janji Kinerja pada awal Januari 2017 itu mengambil tema:

“Mewujudkan Reformasi Hukum dan E-Government PASTI Nyata” di lapangan Upacara Ke-

mentarian Hukum dan HAM, Selasa, 3 Januari 2017

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembina apel saat itu, diisi dengan pengucapan janji kinerja oleh seluruh pegawai.

Yasonna mengatakan, bahwa kerja belum selesai, masih banyak persoalan, tantangan dan hambatan serta permasalahan yang belum ditindak lanjuti dan harus dipecahkan bersama-sama.

Dia juga berpesan kepada seluruh jajarannya untuk terus melakukan inovasi dan menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat.

“Pelayanan dalam pengurusan di bidang Keimigrasian, AHU dan Kekayaan Intelektual,” tuturnya.

“Jangan berhenti berinovasi dan tetap meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga kita mampu menjadi yang terbaik dan yang terdepan,” Yasonna melanjutkan.



## Menkumham: APIP Harus Mampu Menjadi Garda Terdepan

Tim Aparatur Pengawas Intern Pemerintah harus mampu menjadi garda terdepan dalam pengendalian dan pengawasan Laporan Keuangan. Dan optimal melakukan pendampingan ke seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Aidir Amin Daud beserta jajaran di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenkumham menghadiri acara Penyampaian Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2016 oleh BPK RI yang bertempat di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu 31 Mei 2017.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Sariwanto pada Laporan Kegiatan, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan kepada seluruh jaja-

ran Kemenkumham khususnya para pengelola keuangan agar terus melakukan perbaikan penyajian laporan keuangan untuk mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang.

Sebab pada akhir tahun 2016 menjadi pencapaian yang cukup baik bagi pengelolaan keuangan Kemenkumham.

Beberapa penghargaan dari Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan keuangan yaitu Kementerian Negara atau Lembaga dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik, Peringkat 1 untuk Kategori Pagu Besar, Kementerian Negara atau Lembaga dengan Kontribusi PNPB Terbesar Dalam APBN dan

Kementerian Negara atau Lembaga Pengelola PNBPN Terbaik, telah diraih oleh Kemenkumham," ujarnya.

Adapun pada sambutannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, mengucapkan terima kasih kepada Dr. Agung Firman Sampurna, Dr. Heru Kreshna Reza, beserta Tim Auditor BPK yang telah mengaudit dan memeriksa kinerja keuangan Kemenkumham dengan sangat teliti dan cermat.

Sehingga laporan Keuangan Kemenkumham memperoleh opini WTP dan juga kepada Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, yang telah



berupaya memberikan ilmu dan best practice akuntansi.

"Sehingga jajaran kami khususnya pengelola keuangan mampu menerapkan kaidah akuntansi dengan benar," ucapnya.

Yasonna melanjutkan tidak lupa juga terima kasih kepada jajaran Kemenkumham yang telah berkontribusi maksimal dan berupaya mewujudkan opini WTP.

"Ini adalah salah satu buah dari kerja keras yang kita lakukan selama ini. Namun demikian, hal itu belum membuat BPK serta merta percaya pada kinerja keuangan kita.

BPK melakukan pengujian akuntabilitas (pertanggungjawaban) sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017, melalui pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2016 pada tiga area, yaitu Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian intern, dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan," ujarnya.

Selanjutnya, anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI Dr. Agung Firman Sampurna mengatakan, akuntabilitas bukan kewajiban pengelola keuangan negara saja, melainkan suatu budaya yang harus dibangun bersama (Accountability for All), katanya.

Untuk itu, Inspektorat Jen-

deral sebagai APIP diharapkan berperan secara optimal dan konsisten dalam pengelolaan keuangan dan barang negara lebih akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Untuk mempertahankan opini WTP, saya minta jajaran Inspektorat Jenderal khususnya Tim Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lebih optimal lagi melakukan pendampingan ke seluruh satuan kerja dilingkungan Kemenkumham," pesannya.



Menurutnya APIP harus mampu menjadi garda terdepan dalam pengendalian dan pengawasan, sehingga kedepannya tidak diketemukan lagi adanya penyimpangan dan temuan oleh Tim Auditor Eksternal.

Oleh karena itu, APIP harus terus meningkatkan dan mengupgrade kompetensi baik pengetahuan dan pengalaman untuk mengikuti perkembangan aturan yang berlaku dan mampu menjadi bagian dari *problem solver* bagi Kemenkumham.

Disela-sela acara ini, Menkumham menyerahkan Piagam Penghargaan Dewan Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia atas Kerjasamanya Dalam Rangka Sertifikasi Ahli Akuntansi Hukum dan HAM, Piagam Penghargaan Kinerja Penyerapan Anggaran dan Pengelolaan BMN Tahun 2016 Terbaik Tingkat Kantor Wilayah.

Adapun dalam akhir sambutannya untuk mengajak seluruh jajaran Kemenkumham menjaga dan pertahankan WTP.

"Ini menjadi opini Lembaga atau Kementerian kita dengan terus bekerja keras secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif," ajak Yasonna.



## Tim Gabungan Kemenkumham Melakukan Investigasi ke Lapas Kelas IIA Jambi

*Ratusan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi mengamuk. Usut punya usut, karena adanya rencana razia yang akan dilaksanakan bersama aparat penegak hukum.*

Ratusan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi mengamuk pada Rabu 1 Maret 2017. Sejumlah bangunan yang ada di dalam Lapas ikut dibakar oleh ratusan WBP.

Untung dalam aksi itu, pihak kepolisian segera terjun ke lapangan dan melakukan tindakan tegas kepada WBP yang melakukan kerusuhan dengan melepaskan tembakan gas air mata.

Atas ulah rusuhnya WBP di Lapas Kelas IIA Jambi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Asasi Manusia (Kemenkumham), Provinsi Jam-

bi Bambang P memberikan keterangan dalam laporannya bahwa kerusuhan dipicu karena adanya rencana razia di dalam Lapas yang akan dilaksanakan petugas Kemenkumham dan aparat penegak hukum.

“Kami belum melakukan razia, baru rencana. Rupanya, mereka (para WBP-red) menolak dilakukannya razia tersebut,” ujar Kakanwil Kemenkumham Jambi, Kamis 2 Maret 2017.

Sementara itu, dari adanya kerusuhan Lapas Kelas IIA Jambi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly merasa geram dan akan segera melaku-

kan tindakan.

“Kita akan evaluasi dan segera turunkan tim gabungan dari pusat, untuk melakukan investigasi dan evaluasi,” ucap Menkumham tegas.

Kemudian setelah perintah itu disampaikan kepada jajarannya, tim gabungan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM segera turun ke tempat jadian perkara (TKP).

“Tim gabungan terdiri dari Sekretaris dan Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Inspektur Wilayah II pada Inspektorat Jenderal Kementerian-kumham dan anggota tim lainnya yang turun ke lokasi” ujar Syahrul, salah satu anggota tim dari Itjen Kemenkumham.



## Lapas Industri Sarana Pengembangan Bakat Warga Binaan Pemas-



*Lapas Industri bertujuan untuk pengembangan kemampuan dan keterampilan kerja WBP, sebagai bekal ketika mereka akelah sudah bebas menjalani masa hukuman.*

Inspektorat Wilayah II pada Inspektorat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan pelatihan membahas terkait pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Industri.

Kegiatan yang berasal dari anggaran baru 2017 ini dilaksanakan di ruang rapat Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kemenkumham dengan mengundang Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami sebagai narasumber.

Acara itu dihadiri juga oleh Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenkumham sebagai peserta, Selasa 17 Januari 2017.

Puguh Budi menuturkan bahwa Lapas Industri merupa-

kan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang menjalankan fungsi melakukan pembinaan dan pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya menjadi ke arah industri.

“Sehingga dapat menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,” ucapnya.

Lapas Industri, dia melanjutkan, juga merupakan salah satu program unggulan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang didasari pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 53 Tahun 2016 tentang pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan industri di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lapas Industri bertujuan untuk pengembangan kemam-

puan dan keterampilan kerja WBP, sebagai bekal ketika mereka akelah sudah bebas menjalani masa hukuman.

Selain itu, menurutnya untuk menunjang kemandirian operasional Lapas dan kebutuhan masyarakat serta instansi lain. Dan jika dilihat dalam skala yang lebih luas lagi akan menjadi core business.

Hal ini berorientasi pada profit untuk kepentingan Negara. Kemudian kegiatan dalam Lapas Industri akan dibangun fasilitas sarana dan prasarannya. Bahkan direncanakan untuk operasionalnya diberikan kepada pihak swasta.

Lapas hanya menyiapkan Sumber Daya Manusia saja. “Dalam batas waktu 25 tahun akan diserahkan ke pemerintah atau Kementerian kita,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Wilayah II, Nugroho menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada tim yang akan mendampingi untuk mengevaluasi terhadap kegiatan Lapas Industri. Sebab menurutnya terutama bagi UPT yang mendapatkan APBN-P berjumlah besar.

Kegiatan dilaksanakan bermaksud untuk menyusun instrumen dan sebagai bahan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut terhadap pengelolaan atau pengembangan Lapas Industri di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

“Utamanya pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II yaitu pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, yang akan menjadi target dan sasaran terhadap pengelolaan dan pengembangan Lapas Industri,” tuturnya.



## Reformasi Birokrasi Zona Integritas Itjen Kemenkumham

*Kegiatan pelatihan mengenai evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).*

Asisten Deputi koordinasi penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempenan dan RB) Agus Uji Hartara, hadir memenuhi undangan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham), Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 27 Februari 2017.

Agus, menjelaskan kedatangannya ke Kemenkumham dalam rangka memenuhi undangan sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan pelatihan mengenai evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Saya sangat apresiasi sekali dengan Kemenkumham khususnya Inspektorat Jenderal. Karena di tahun ini sebanyak 50 satker diusulkan untuk ikut dalam program WBK/WBBM,” ujarnya.

Kempenan dan RB mem-

berikan apresiasi kepada Kemenkumham atas keseriusannya dalam hal melakukan tindak lanjut terhadap apa yang sudah dilakukan dalam Reformasi Birokrasi dan mengusulkan 50 Satuan Kerjanya (Satker) di 2017 ini untuk menjadi satker yang WBK atau WBBM.

Kempenan dan RB, bahkan mencatat pada 2016 telah memberikan penghargaan kepada 19 unit kerja pelayanan publik kepada Kemenkumham. Di antaranya 17 satker memperoleh predikat WBK dan 2 satker lainnya memperoleh predikat WBBM.

“Hasil itu diperoleh dari evaluasi yang dilakukan Kempenan dan RB terhadap 223 unit kerja pada 175 Kementerian atau Lembaga, 18 Provinsi, dan 30 Kabupaten/Kota yang mengusulkan setelah mencanangkan sekaligus melakukan pembangunan Zona Integritas,” tuturnya.

Lebih lanjut, Itjen Kemenkumham pada Maret-April 2017 akan melakukan pendampingan dan penetapan satker dalam pro-

gram Reformasi Birokrasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebanyak 50 satker. Antara lain dari unit Eselon I, 1 dari Kantor Wilayah, 21 satker Keimigrasian, dan 25 satker dari Masyarakat.

Inspektur Wilayah III Itjen Kemenkumham, Juliasman Purba selaku penyelenggara kegiatan berharap di 2017 ini Kemenkumham dapat mendapatkan kembali predikat penilaian dari Kempenan dan RB.

Dia berharap, kedepan Kemenkumham harus semakin tegas dan benar - benar dapat mendorong terhadap satker-satker yang kita usulkan supaya dapat memperoleh predikat WBK atau WBBM.

“Kita jangan terlalu fokus untuk mendapatkan juara, tetapi kita harus mampu mengarahkan dan mendorong satker yang kita usulkan untuk melakukan hal yang benar menuju integritas yang tinggi,” dia menuturkan.

## Pengisian Sasaran Kerja Pegawai

*Pengisian SKP ada empat aspek yang harus diperhatikan yaitu, kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya untuk melaksanakan kegiatan menjadi target. Adapun perilaku kerja meliputi enam aspek yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan.*



Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama dua hari berturut-turut yaitu pada 5-6 Januari 2017, menggelar rapat internal membahas mengenai pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2016, yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Luluk Rataningtyas di dalam ruang rapat kerjanya.

“Tujuan rapat ini adalah untuk memastikan adanya kesamaan dalam hal penyusunan, penilaian, dan perhitungan secara baik dan benar dalam pengisian SKP,” ujarnya menjelaskan.

Pegawai Negeri Sipil atau lebih resmi disebut dengan istilah Aparatur Sipil Negara (ASN) tentunya tidak asing lagi dengan istilah penilaian prestasi kerja. Hal itu dilakukan setiap satu tahun sekali penilaiannya.

Metode penilaian ini dilakukan melalui pendekatan SKP yang dinilai melalui dua

unsur, yaitu pertama prestasi kerja dan kedua perilaku kerja, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai.

Luluk Rataningtyas menjelaskan pengisian SKP ada empat aspek yang harus diperhatikan yaitu, kuantitas (banyaknya kegiatan yang menjadi target kerja selama kurun waktu tertentu), kualitas (kualitas dari kegiatan yang menjadi targetnya), waktu (waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi target) dan biaya (banyaknya anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan atau *output* yang menjadi targetnya).

Adapun perilaku kerja meliputi enam aspek yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan.

Bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional umum, dalam

mengisi SKP harus memperhatikan uraian jabatan dalam tugas dan fungsinya serta rencana kerja tahunan yang menjadi tanggung jawabnya, dengan mengacu pada SKP dari atasan langsungnya.

Sedangkan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dalam penyusunan SKP harus mengacu pada lampiran kegiatan yang ada pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Yang mengatur tentang jabatan fungsional tertentu dan angka kreditnya sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing,” tutur Luluk.

Sebelum kegiatan berakhir, Sekretaris Inspektorat Jenderal mengharapkan sebelum tanggal 11 Januari 2017, pengisian SKP 2016 sudah selesai semua pengisiannya, dan untuk segera dimasukkan ke dalam Aplikasi New SIMPEG 015 ([simpeg.kemenkumham.go.id](http://simpeg.kemenkumham.go.id)).





## Kegiatan Pengenalan Aplikasi JDIHN untuk Mengelola Dokumentasi Perpustakaan

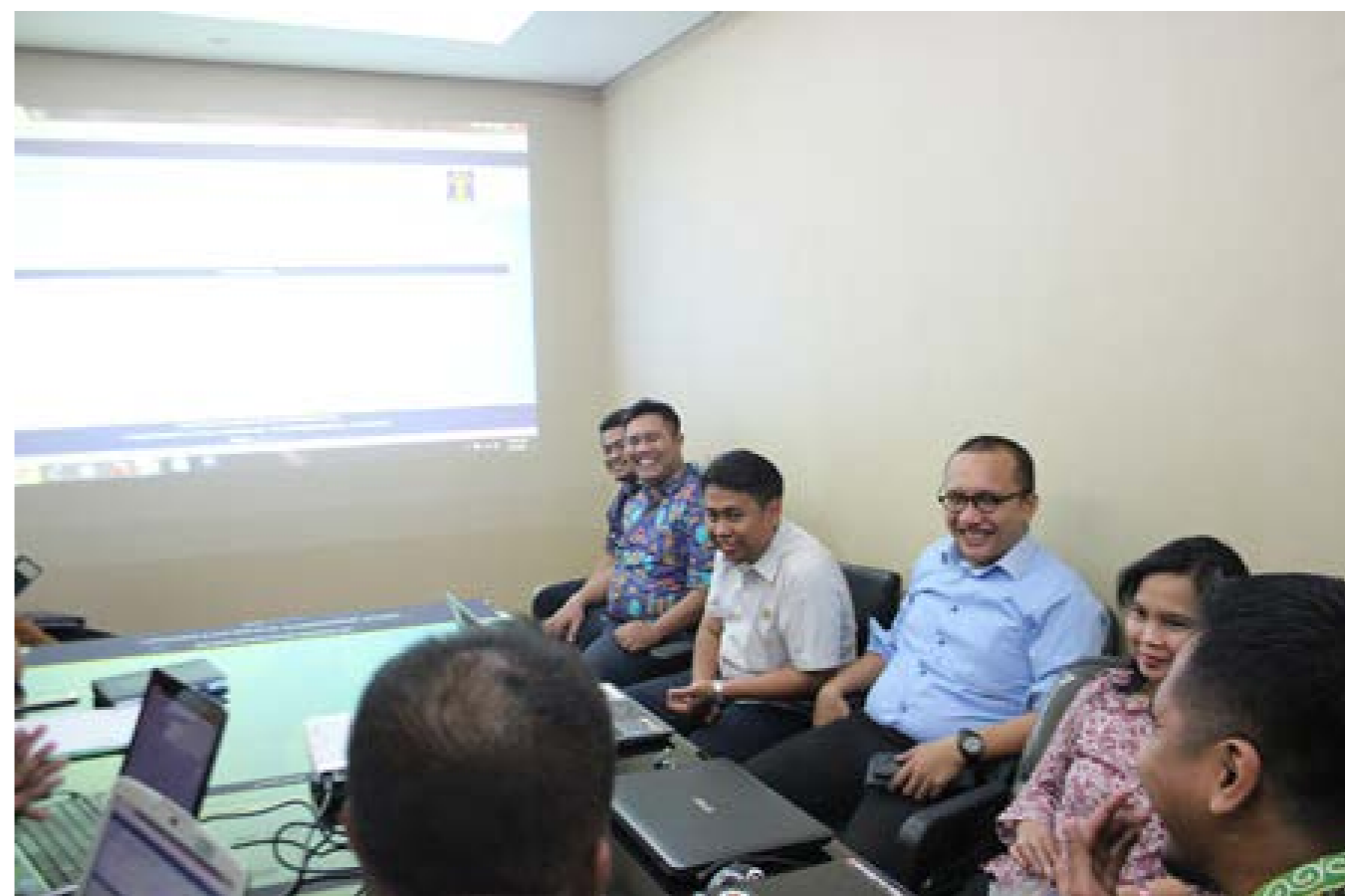
Kepala Sub Bagian Humas, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham), Slamet Iman Santoso mengundang fungsional pustakawan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPHN Kemenkumham),

Aditya Pandu untuk menginformasikan perihal aplikasi perpustakaan baru yang terintegrasi ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), pada Kamis 2 Maret 2017.

Iman menjelaskan dengan adanya aplikasi JDIHN ini, diharapkan dapat membantu Itjen Kemenkumham dalam mengelo-

la perpustakaan ke arah yang lebih baik lagi.

Dia berharap Aplikasi JDIHN dalam penerapannya dapat membantu Program Humas dan Pelaporan Itjen Kemenkumham. “Khususnya dalam melakukan kegiatan pembahasan pengelolaan perpustakaan,” ujarnya.





## Kegiatan Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah



Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham) menyelenggarakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Quality Assurance Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menuju Level 3, dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Luluk Ratnaningtyas dan Inspektur Wilayah V Itjen Kemenkumham, Siti Honiyah, Selasa 4 April 2017.

Rapat tersebut dihadiri oleh Pejabat Struktural dan Perwakilan Auditor dari masing-masing wilayah yang meliputi dari Wilayah I sampai dengan VI di lingkungan Itjen Kemenkumham yang bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham Lantai 16 Gedung Ex Sentra Mulia Kuningan, Jakarta Selatan.





## Kegiatan Pengumpulan Data Dukung Target Kinerja B03

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham), Luluk Ratnaningtyas menyelenggarakan rapat dan memimpin langsung pembahasan tentang Program Pengendali Gratifikasi dan Whistle Blowing System terkait pengumpulan data dukung target kinerja B03, pada Jumat 10 Maret 2017. Selain itu, Sekretaris Itjen Kemenkumham ini juga membuka kegiatan rapat evaluasi pelaksanaan dukungan manajemen teknis lainnya, terkait program persiapan data B03 di lingkungan Itjen Kemenkumham pada Rabu 13 Maret 2017.





## Kebangkitan Nasional Bukan Sekadar Tertanam di Hati, Melainkan Wujudkan Segera dalam Pelayanan

*Pemerataan pembangunan antar wilayah hendaknya diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran. Yaitu dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka kesatuan Indonesia. Pembangunan Indonesia yang berkeadilan sebagai wujud kebangkitan nasional.*

Kepala BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mardjoeki membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika, mengenai tema Hari Kebangkitan Nasional yang terdapat pesan Kebangkitan Nasional tidak hanya tertanam di hati. Melainkan harus segera diwujudkan melalui strategi kebijakan dan implementasi.

"Yaitu dalam pelayanan terhadap masyarakat dan bangsa," ucapnya selaku menjadi Inspektur Upacara yang bertempat di Lapangan Upacara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada Senin 22 Mei 2017.

Menurutnya rakyat Indonesia pada abad ke-20, mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai "orang Indonesia".

Masa itu ditandai dengan dua peristiwa penting yaitu berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Masa

itu juga merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli.

"Sehingga sejak berdirinya organisasi kepemudaan Boedi Oetomo pada 20 Mei dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional," tuturnya.

Lebih lanjut, Mardjoeki menambahkan dalam program Nawacita yang disusun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Khususnya pada aspek pemerataan mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi. Menurutnya pemerataan pembangunan antar

wilayah hendaknya diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran.

Yaitu dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka kesatuan Indonesia.

"Bagi kita, kebangkitan nasional hanya akan berarti, jika tidak ada satu anak bangsa pun yang bercecer dari gerbong kebangkitan.

Berlatar belakang pemikiran tersebut maka kiranya kita mempertahankan pembangunan Indonesia yang berkeadilan sebagai wujud kebangkitan nasional," ucapnya.



## Rapat Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi SIKD Kemenkumham

*Aplikasi SIKD mempermudah pengguna atau operator dalam mengelola data atau arsip. Sekaligus memangkas waktu yang diperlukan untuk menyimpan dan menyampaikan serta mencari data atau arsip.*

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan rapat uji coba dan evaluasi penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Bagian Umum Inspektorat Jenderal Purnawan Hari, di ruang rapat Inspektur Jenderal lantai 16 Gedung Ex. Sentra Mulia, Kuningan Jakarta Selatan, Selasa 17 Mei 2017.

Sistem pengolahan arsip berbasis teknologi informasi atau yang di kenal dengan nama SIKD merupakan suatu sistem aplikasi yang dirancang dan dikembangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Maka untuk menangani pengelolaan arsip dinamis di sebuah instansi atau organisasi sesuai dengan kaidah - kaidah kearsipan.

"Kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan arsip di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenkumham, agar tercipta suatu sistem pengelolaan arsip secara tepat, tertib, efisien sesuai dengan norma dan kaidah

kearsipan," tutur Purnawan Hari. Selain itu, aplikasi SIKD juga bertujuan untuk mempermudah pengguna atau operator dalam mengelola data atau arsip yang sangat beragam dan dalam jumlah yang tidak sedikit.

Adapun aplikasi SIKD juga akan memangkas waktu yang diperlukan untuk menyimpan dan menyampaikan serta mencari data atau arsip.

"Untuk digunakan kembali sebagai bahan informasi pengam-

bilan keputusan," ucap M. Asikin Kepala Sub Bagian Pengelolaan Arsip Dinamis Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenkumham.

Aplikasi SIKD Kemenkumham ini juga dapat diakses dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan laptop, komputer ataupun HP android dengan alamat *website* di SIKD.

kemenkumham.go.id. Sehingga tahun ini surat menyurat dapat menggunakan aplikasi SIKD dengan cepat dan tepat.



## PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAN PELAKSANAAN E-GOVERNMENT

### A.LATAR BELAKANG

Di jaman era globalisasi yang semakin meningkat maka segala kebutuhan diupayakan harus selalu optimal sehingga kebutuhan akan Teknologi Informasi sangat diperlukan saat ini.

Teknologi Informasi merupakan pilihan tepat disaat ingin melaksanakan suatu apapun yang bersifat cepat, mudah dan hasilnya maksimal, Bahwa Teknologi Informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer.

Dengan adanya Teknologi Informasi maka memudahkan user/pengguna untuk mengerjakan apapun yang berbasis sistem informasi teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja kapan saja dan dari siapa saja.

Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2017 setiap unit eselon I wajib mencanangkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimana tahun 2017 telah ditandatangani janji kinerja dalam setiap proses bisnis yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja organisasi sehingga pelayanan yang optimal wajib diimplementasikan sebagai

wujud Kementerian Hukum dan HAM mendukung pemerintah dalam menerapkan E-Government.

Kementerian Hukum dan HAM saat ini berkomitmen untuk



meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal kinerja dan pelayanan publik, meningkatkan transparansi kontrol serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan good corporate governance.

Fungsi pengawasan internal pada Kementerian Hukum dan HAM tertuang dalam Pasal 949 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 yakni Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern Kementerian Hukum dan HAM, bahwa dengan hal tersebut jelas Inspektorat Jenderal melaksanakan fungsi pengawasan internal baik secara kebijakan teknis, kinerja, audit, reviu tujuan tertentu sampai dengan semua kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan implementasi E-Government.

Dalam melaksanakan tugas tersebut maka Inspektorat Jenderal sebagai APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) sebagaimana perwujudan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) maka APIP harus mem-

berikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Peran yang efektif dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diharapkan menjamin agar penyelenggaraan E-Government dilaksanakan dengan baik, efisien, dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku juga dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, bebas dari penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme KKN sehingga konsep good governance dan clean government sinergi dengan implementasi E-Government dengan terwujudnya pelayanan publik yang baik dan melayani masyarakat dengan optimal agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan tulisan karya tulis ilmiah dengan judul.

“ PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DALAM PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN E-GOVERNMENT”.

### a. E-Government

E-Government merupakan kependekan dari eletronik pemerintah, E-Government biasa dikenal dengan e-gov, pemerintah digital atau pemerintah transformasi.

E-Government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis eletronik.

Fungsi dan tujuannya antara lain yaitu untuk meningkatkan mutu layanan publik, dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat terbentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan juga supaya dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

### b. Fungsi E-Government dan Manfaat E-Government

Fungsi dan tujuannya antara lain yaitu untuk meningkatkan mutu layanan publik, dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat terbentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan juga supaya dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan e-government ini dapat memberikan tambahan manfaat yang lebih kepada masyarakat :

1.Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang ke-

hidupan bernegara;

2.Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN);

3.Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;

4.Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;

5.Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan

6.Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis

### c. Jenis-jenis E-Government, di antaranya sebagai berikut:

1.Government to Citizen (G2C) adalah suatu teknologi informasi yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan juga untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan.

2.Government to Business (G2B) adalah suatu tipe hubungan pemerintah dengan bisnis.

3.Government to Government (G2G) adalah berupa Web pemerintah yang dibuat, bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lainnya, dengan tujuan yaitu untuk memperlancar & mempermudah kerjasama antara pemerintahan – pemerintahan yang bersangkutan.

4.Government to Employees (G2E) adalah berupa tipe hubungan yang ditujukan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk meningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja disalah satu institusi pemerintah.

### B.RANGKUMAN TEORI

Dari teori diatas maka pelaksanaan e-government yang dicanangkan oleh pemerintah yang diimplementasikan kepada Kementerian atau Lembaga dalam upaya perubahan untuk menciptakan good governance selalu dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata dalam melakukan pelayanan publik dan mendapatkan kesejahteraan kepada masyarakat serta meningkatkan fungsi pelayanan menjadi cepat, tepat, mudah dan efektif.

Dalam hal ini bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan pengawasan internal sebagai keefektifan pelaksanaan E-Government dan peran tersebut dipercayakan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

## PENYIMPANGAN MANUSIA (DALAM PERSPEKTIF ISLAM)

Pada awalnya (fitrah) manusia bersifat baik.

Pada awalnya Allah SWT menciptakan bumi beserta isinya dan dilengkapi dengan penciptaan lam semesta. Selanjutnya Allah menciptakan makhluk halus seperti malaikat, jin, iblis atau setan yang bertujuan untuk beribadah kepada-Nya.

Maka tibalah kehendak Allah SWT untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni bumi untuk memelihara dan bukan untuk merusaknya. Makhluk lain tersebut kemudian dikenal dengan nama manusia.

Abu Hurairah berkata : "Rasulullah shallallahu alaihi wasalam telah bersabda : soerang bayi dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah).

Kemudia kedua rorang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi yahudi, nasrani ataupun majusi, sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan

adanya cacat? Lalu Abu Hurairah berkata : Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi : "...tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidk ada perubahan atas fitrah Allah. (QS. Ar Ruum (30):30).

Kekuatiran para Malaikat.

Maka untuk menghilangkan kekhawatiran malaikat tersebut Allah berfirman : Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan Aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumi-Ku.

Bila Aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai



Achmad Syarief (Ditjen Imigrasi)

penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah, Karena Allah SWT melarang hamba-Nya beribadah kepada sesama makhluk-Nya." Keunggulan manusia dibandingkan makhluk lainnya

Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat maupun iblis terhadap dam dan menyakinkan mereka akan kebenaran hikmat-Nya menunjuk Nabi Adam sebagai penguasa bumi, maka diajarkanlah kepada Nabi Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta, kemudia diperagakanlah benda-benda itu didepan para malaikat seraya:

"cobalah sebutkan bagi-Ku nama benda-benda itu, jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam.

"Para malaikat tidak berdaya memenuhi tantangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada didepan mereka. Mereka mengakui ketidak-sanggupan mereka dengan berkata:

"Maha Agung Engkau, sesungguhnya kamu tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana."

Iblis membangkang.

Karena kesombongannya, maka Allah menghukum iblis dengan diusir dari surga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat.

Disamping itu ia dinyatakan sebagai penghuni neraka. Tetapi dengan kesombongannya iblis menerima hukuman tersebut, dan ia memohon kepada Allah diberi kesempatan (penangguhan) untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat.

Allah meluluskan permohonanannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan, tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu, bahkan sebaliknya ia mengancamkan menyekat Nabi Adam dan keturunannya sampai hari kiamat.

Adam menghuni surga.

Allah berpesan kepada Adam: "Tinggallah engkau Bersama isterimu di surga, raskanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah didalamnya, rasailah dan makanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat didalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu.

Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga ataupun letih selama kamu berada didalamnya. Akan tetapi Aku ingatkan janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim.

Ketahuiilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh isterimu, ia akan berusaha membuuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati ini."

Godaan iblis dan penyimpangan pertama manusia (nabi adam).

Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari surga akibat pembangkangannya dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya tersingkir dari singgasana kebesarannya.

Iblis mulai menunjukkan rancangan penyekatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di surga yang tenteram, damai dan bahagia.

Adam dan hawa diturunkan ke bumi.

Adam dan Hawa merasa tenteram kembali setelah menerima pengampunan Allah dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh iblis dan akan berusaha agar pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan murka dan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka berdua untuk lebi berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan iblis yang terlaknat itu.

Harapan untuk tinggal terus di surga telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah, hidup kembali dalam hati dan pikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di surga tidak akan terganggu oleh sesuatu dan bahwa ridho Allah serta rahmat-Nya akan tetap melimpah diatas mereka untuk selama-lamanya.

Pengajaran yang terdapat dari kisah nabi adam.

Bahwa manusia walaupun ia telah dikaruniakan kecerdasan berpikir dn kekuatan fisik dan mental dan tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya seperti sifat lalai, lupa dan khilaf. Hal mana telah terjadi pada diri Nabi Adam yang walaupun ia telah menjadi manusia yang sempurna dan dikaruniakan kedudukan yang istimewa di surga ia tetap tidk terhindar dari sifat-sifat

manusia yang lemah itu.

Ia telah lupa dan melalaikan peringatan Allah kepadanya tentang pohon terlarang dan tentang iblis yang menjadi musuhnya dan musuh seluruh keturunannya, sehingga terperangkap ke dalam tipu daya dan terjadilah pelanggaran/ penyimpangan yang dilakukan oleh manusia terhadap larangan Allah.

Perlindungan manusia dari gangguan syaitan dan jin.

Banyak hal yang menyebabkan syaitan dari golongan jin ini bersarang dan menempel ditubuh manusia dan membinasakan manusia itu sebagaimana benalu menempel pada tanam-tanaman dan membinasakannya, antara lain sebagai berikut :

1. Berpaling dari peringatan Allah seperti disebutkan dalam surat Az Zumar ayat 36-37

2. Memperturutkan syahwat dan hawa nafsu seperti disebutkan dalam surat An Naziat 37-39;

3. Suka memberi sesaji dan mengikuti ritual pemujaan kepada sesuatu selain Allah;

4. Menyimpan jimat, wifik, benda pusaka untuk menjaga diri dan mendapatkan rezeki serta kemuliaan;

5. Merupakan warisan leluhur yang melakukan kerjasama dengan bangsa jin (jin saka)

6. Melakukan amalan dan wirid untuk mendatangkan khodam jin;

7. Jiwa dalam keadaan lemah akibat kesedihan, kekecewaan dan rasa tertekan yang mendalam;

8. Secara tidak sengaja mengganggu habitat kehidupan bangsa jin (tempat angker);

9. Dikirim orang lain dengan perantara sahir, berupa santet, santau, pellet atau guna-guna.

Membentengi diri dari gangguan syaitan dan jin.

Beberapa langkah yang dapat kita kerjakan untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas, sehingga berhak mendapat naungan dan perlindungan dari Allah antara lain :

1. Selalu ingat Allah didalam hati dimanapun berada baik ketika berdiri, duduk dan berbaring sebagaimana disebutkan Allah dalam surah An-nisa:103 dan Al Araaf:205;

2. Melaksanakan sholat dengan benar dan khusuk, mengerti dan paham setiap ayat dan kalimat yang dibaca dalam shalat (surah Al-Mukminuun:1-2);

3. Membaca Al-Quran setiap hari dengan mentadaburi dan memahami maknanya;

4. Menghidupkan malam hari dengan mengerjakan shalat malam, tahajud atau membaca Al-Quran (surah Al-Muzzamil:1-11);

5. Berdzikir memuji Allah dan bertasbih diwaktu pagi dan sore hari (surah Al-Ahzab:41-42);

6. Memperbanyak istiqfar mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan (surah Hud:3);

7. Bersungguh-sungguh berjuang serta berjihad dijalan Allah dengan harta dan dirinya (surah As-Shaaf:11);

8. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan memperturutkan hawa nafsu dn syahwat (surah An-Naziat:40-41);

9. Menjauhkan diri dari perbuatan musyrik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu (surah An-Nisa:48);

10. Selalu mengerjakan amal soleh dana mal kebaikan yang diridhoi dan dicintai Allah (surah An-Nahl:97).

# HIDDEN FIGURES



Hidden Figures

Sutradara : Theodore Melfi

Pemeran : Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner

Produksi : Fox 2000 Pictures, 2017

## Kesuksesan Terkadang Menyembul Dari Angka Tersembunyi

*Dibalik keberhasilan negara “super power” Amerika Serikat yang berhasil mengirimkan astronot pertamanya. Agak luput peran serta seorang 3 wanita berkulit hitam Amerika, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, dan Mary Jackson.*

Ada kisah menarik dalam film drama Hidden Figures karya Sutradara Theodore Melfi pada 2017 ini. Karya film yang berkisah nyata, latar belakang perjalanan negara super power Amerika Ser-

ikat yang berhasil mengirimkan astronot pertamanya John Glenn yang mengorbit ke luar angkasa—menjamin selamat balik ke bumi. Cerita punya cerita, keberhasilan Amerika itu tidak luput dari per-

an serta seorang 3 wanita berkulit hitam Amerika, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, dan Mary Jackson.

Mereka adalah sosok yang terlupakan dibalik sejarah keber-

hasilan National Aeronautics and Space Administration (NASA) atau Badan Antariksa Amerika Serikat dalam proyek menyukseskan membawa misi manusia ke luar angkasa. Ketiga wanita berkulit hitam ini memiliki bakat yang tidak kalah dengan kemampuan warga Amerika yang berkulit putih. Sebutlah seperti pada bidang matematika, pengawas mesin canggih IBM, dan insinyur membuat badan pesawat luar angkasa.

Mengapa ada kata hitam-putih? Film ini, memang mengambil kisah situasi era S.A.R.A (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) begitu kental di negeri Paman Sam ketika itu. Padahal, konon di Amerika Serikat begitu mengelu-elukan demokrasi dan persamaan hak kepada warga negaranya. Walau dalam realita hidup yang sesungguhnya tidaklah seperti yang mudah dikata.

Tengoklah, pada saat adegan bagaimana Katherine begitu tertekan saat bekerja di kantor program luar angkasa NASA di bawah pimpinan Al Harrison. Hati dan perasaannya terganggu-guncang karena tindakan S.A.R.A diremehkan tidak layak masuk ke dalam program luar angkasa NASA karena berkulit hitam. Khususnya sikap Paul Stafford orang nomor kedua di program luar angkasa NASA, sekaligus matematikawan kepercayaan Al Harrison yang diberikan tugas untuk menghitung lintasan penerbangan dalam proyek Merkuri pada 1961.

Paul sebagai matematikawan yang dipercaya untuk



menghitung lintasan penerbangan, ternyata tidak begitu jenius dibanding Katherine. Katherine justru yang lebih paham atas hitungan lintasan penerbangan pesawat NASA untuk mengorbitkan astronot ke luar angkasa. Sedangkan pegawai yang bekerja di program luar angkasa NASA adalah orang-orang jenius yang terpilih untuk berpikir dalam bidang matematika.

Maklum bila pimpinan program luar angkasa Al Harrison, akhirnya percaya kepada Katherine untuk mengajaknya ikut bergabung ke proyek luar angkasa NASA selanjutnya. Apollo 11 yang mengirim manusia menuju ke Bulan pada 1969. Katherine Johnson figur penting atas keberhasilan NASA tersebut. Siapa yang tahu orang yang sebelumnya dipandang sebagai nomor dua, dapat menjadi nomor satu dalam perjalanan hidup?

Duh, memang menyebalkan ketidakadilan untuk dirasakan, dilihat, apalagi bila terjadi. Tapi percayalah, orang-orang yang mengalami ketidakadilan dalam hidup akan lebih dewasa dan tegar. Bahkan akan ranum saat menjalani hidup. Tengoklah, apa yang dialami oleh Katherine

Johnson. Dia ketika masuk ke suatu lembaga khusus dalam program luar angkasa sudah menjalani proses seleksi ketat.

Lembaga yang dapat menjadi inspirasi dalam kemajuan umat manusia memang tidak sembarang untuk dapat bergabung. Sebab bila syarat mutlak bergabung tidak dapat diikuti. Maka tidak akan ada hasil yang akan dicapai. Potensi seseorang memang tidak hanya dilihat dari semata angka-angka. Sebagaimana adagium berbunyi, orang pintar dan bodoh tidak ada di dunia.

Hanya saja, orang menjadi pintar karena seseorang itu giat, rajin, dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Orang disebut bodoh karena memang dirinya tidak giat, rajin, dan bersungguh-sungguh belajar. Kadangkala bersikap malas menjadi sebagian besar pilihan hidupnya.

Syukurlah, bila Katherine memang sudah cerdas sejak sekolah dasar. Dia pun berkali-kali mendapatkan beasiswa pendidikan. Akhirnya berhasil masuk dan bekerja di NASA. Sayangnya, dia lahir saat situasi orang masih banyak melihat suatu warna dibandingkan melihat suatu warna itu dapat memberikan warna apa dalam kemajuan hidup manusia.

Dia menyadari langkah perubahan tidak dapat terjadi dengan cara instan cengeng, gaduh, dan berharap datang tiba-tiba dari langit. Melainkan, kesuksesan terkadang menyembul dari angka tersembunyi. Bukan sekadar pilihan antara menjadi nomor satu atau dua.

## Nasi Balap Puyung

Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata tidak hanya surga pantai dan keindahan bawah laut saja namun juga makanan enak. Anda harus merasakan Nasi Balap Puyung yang pedasnya membuat orang ketagihan. Makanan yang sudah merambah hingga pasar mancanegara ini harus Anda masukkan kedalam daftar sajian kuliner yang harus dicicipi.

Secara tampilan, menu Nasi Balap Puyung ini tidak terlalu istimewa. Hanya berisi suwiran daging ayam yang diolah bersama cabai, kacang kedelai, taburan udang kering, abon serta belut goreng. Kekuatan makanan ini adalah terletak dari rasa pedas bumbunya yang sederhana.

Sedangkan bumbu ayamnya terdiri dari cabai, bawang putih dan terasi. Untuk perband-

ingan, jika kita memasak 10 kg ayam, komposisi cabainya sekitar 1 kg dan sedikit bawang putih serta terasi.

Tempat yang terkenal nasi balap puyungnya di Lombok berada di nasi balap puyung cap Inaq Esun di Desa Puyung, Lombok Tengah. Jika malam semakin larut, tempat makan ini semakin ramai pembeli.

Keistimewaan nasi milik Inaq Esun ini adalah karena tidak memakai bahan pengawet alias bahan-bahannya alami dan diproses dengan bumbu tradisional khas Sasak. Pedasnya nasi ini memang sangat nendang. Para pembeli yang datang selalu repot mengelap keringat yang bercucuran karena menahan pedas. Selamat mencoba!





## Plecing Kangkung Khas Lombok

Kangkung sudah sangat akrab di lidah masyarakat Indonesia. Tetapi ada yang berbeda pada plecing kangkung khas Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Kangkung yang digunakan untuk memasak Plecing ini juga sangat khas.

Tidak seperti tanaman kangkung yang biasa tumbuh di Pulau Jawa, kangkung khas Lombok ini berupa kangkung air yang biasanya ditanam di sungai yang mengalir dengan metode

tertentu sehingga menghasilkan kangkung dengan batang yang besar dan renyah.

Kangkung di daerah ini memang sangat terkenal, teksturnya lembut sehingga tidak terasa alot walaupun kita makan hingga ke batangnya.

Plecing kangkung yang renyah dipadukan dengan sambal yang terbuat dari tomat yang diolah dan di racik dari cabai rawit serta terasi Lengkre yang gurih dan manis.

Terasi inilah yang makin memperkaya rasa plecing kangkung serta bumbu urap. Anda dapat mencicipi plecing kangkung di setiap Rumah Makan, namun Rumah Makan yang terkenal dengan Plecingnya adalah Rumah Makan Dua-EM bersaudara yang berlokasi di Jalan Transmigrasi 99 Mataram.

Mampirilah untuk merasakan sensasi kelezatan plecing kangkung khas Lombok dan juga kuliner Lombok jenis lainnya.



## Ayam Taliwang

Tidak lengkap rasanya jika datang ke Lombok tetapi tidak mencicipi Ayam Taliwang khas Lombok. Masakan Ayam Taliwang dapat kita temui di Rumah Makan Padang, rugi bila Anda tidak mencicipi Ayam Taliwang Khas Lombok di tempat asalnya.

Menu Ayam Taliwang menggunakan ayam kampung yang be-

rumur tidak terlalu tua sekitar tiga sampai empat bulan, karena ayam akan terasa lebih manis tanpa tambahan pemanis dan akan lebih empuk.

Ayam Taliwang dapat disajikan dengan cara digoreng atau dibakar dengan kayu nangka atau kayu kopi. Kayu jenis ini memberikan aroma lebih enak dan nyala api yang lebih lama.

Jika menggunakan kompor gas atau arang, aroma yang dihasilkan akan berbeda. Rasakan kenikmatan Ayam Taliwang di sela liburan Anda di Lombok, datanglah ke Rumah Makan Ayam Bakar Taliwang, Irama yang berada di kawasan Cakranegara, serta bisa juga di Warung Bang Udin yang tidak pernah sepi pengunjung.



### Sate Bulayak Narmada

Lezat! Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kelezatan Sate Bulayak. Bulayak adalah sejenis lontong yang dibungkus dengan daun aren atau daun enau dengan bentuk memanjang seperti spiral, sehingga untuk membukanya harus dengan gerakan memutar.

Hampir sama dengan lontong, bedanya masakan Jawa itu dibungkus dengan daun pisang. Hampir mirip juga dengan ketupat, tetapi Bulayak lebih lembut dan gurih dibanding ketupat maupun lontong.

Bulayak disajikan dengan sate atau jeroan yang dilumuri bumbu khas Sasak ditambah kucuran air jeruk nipis dan sambal. Bumbunya terbuat dari kacang tanah yang disangrai dan ditumbuk, lalu direbus dengan santan dalam jumlah dominan. Cara menghidangkan Sate Bulayak juga unik.

Penjual biasanya tidak menyediakan garpu maupun sendok sehingga Anda harus menikmati sate ini dengan cara dicocol pada bumbu sate yang sudah disediakan. Anda dapat mengunjungi beberapa objek wisata seperti halaman Pura Lingsar, Taman Narmada, Taman Suranadi, Makam Loang Baloq hingga di beberapa sudut Pantai Senggigi serta di Jalan Udayana.

### Sate Bulayak Narmada



Lezat! Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kelezatan Sate Bulayak. Bulayak adalah sejenis lontong yang dibungkus dengan daun aren atau daun enau dengan bentuk memanjang seperti spiral, sehingga untuk membukanya harus dengan gerakan memutar.

Hampir sama dengan lontong, bedanya masakan Jawa itu dibungkus dengan daun pisang. Hampir mirip juga dengan ket-

upat, tetapi Bulayak lebih lembut dan gurih dibanding ketupat maupun lontong.

Bulayak disajikan dengan sate atau jeroan yang dilumuri bumbu khas Sasak ditambah kucuran air jeruk nipis dan sambal. Bumbunya terbuat dari kacang tanah yang disangrai dan ditumbuk, lalu direbus dengan santan dalam jumlah dominan. Cara menghidangkan Sate Bulayak juga unik.

Penjual biasanya tidak menyediakan garpu maupun sendok sehingga Anda harus menikmati sate ini dengan cara dicocol pada bumbu sate yang sudah disediakan. Anda dapat mengunjungi beberapa objek wisata seperti halaman Pura Lingsar, Taman Narmada, Taman Suranadi, Makam Loang Baloq hingga di beberapa sudut Pantai Senggigi serta di Jalan Udayana.



Maulana adalah putra Mera Lombok yang peduli terhadap tanah kelahirannya. Maklum, nyaris tiap jengkal tanah di Lombok telah diajakinya. Dia pun ingin berbagi mengenai keindahan alam Lombok yang sering terlewat oleh para wisatawan yang berkunjung ke Lombok melalui artikel ini.

Warga di Lombok sendiri, bahkan kerap tidak mengetahui. Kawasan wisata Tanjung Ringgit yang masih memiliki budaya masyarakat yang masih asli belum dijamah dunia modern dan pasir putih mulus dan indah sepanjang jauh mata memandang.

Tanjung Ringgit memiliki kawasan ini sepanjang 20 kilometer persegi. Tanjung Ringgit disebut juga sebagai minimuseum alam. Wisatawan dapat melihat perjalanan Terumbu Karang sejak mulai terbentuk hingga berproses menjadi kars, yaitu hamparan batuan kapur.

Bahkan ada yang membentuk bukit bukit kecil yang indah. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke sini akan menantikan pemandangan saat menyongsong pagi.

Momen itu selain waktunya seseorang untuk menikmati keindahan alam bentukan Tuhan. Bahkan traveler ramai menginap di bawah mercusuar Tanjung Ringgit demi melihat matahari dengan sinarnya yang merah jingga yang lambat-lambat terbit dari balik Pulau Sumbawa.

Suasana di Tanjung Ringgit tak hanya indah di pagi hari saja. Spot-spot yang indah dan memi-



## Menelusuri Keindahan Tanjung Ringgit

*Tanjung Ringgit memiliki kawasan ini sepanjang 20 kilometer persegi. Tanjung Ringgit disebut juga sebagai minimuseum*

liki keunikan masing-masing juga banyak tersedia di sini. Tengoklah tempat untuk berburu sunrise di kawasan timur pantai.

Lokasi di sana terdapat banyak tebing-tebing curam yang angkuh dengan hamparan batu gamping yang tertutup rerumputan hijau. Sedangkan bila bergeser ke sebelah barat, ke pantai sebelah utara, ada dua pantai bersebelahan barat-timur dengan karakter masing-masing.

Oya, bagi calon wisatawan jangan juga lupa menuju sebelah

timur. Di sana ada pantai yang disebut Tangsi.

Tangsi konon adalah barak tentara Jepang pada Perang Dunia ke-II. Nah dari areal ini, wisatawan dapat menikmati terumbu karang dengan ber-snorkeling tanpa harus menaiki perahu. Wisatawan dapat langsung snorkeling dari bibir pantai.

Selain itu, wisatawan dapat selfie dengan banyaknya spot-spot indah untuk aksi fotografi yang sayang dilewatkan. Sebab dari kawasan pantai yang

seolah dipagari bagian timur dan baratnya ini, kita bisa menikmati pemandangan gunung Rinjani di seberang teluk.

Dinding pantai ini tampak jelas ibarat lapisan mirip kue lapis legit yang terbentuk dari terumbu karang. Sungguh seru bukan?

Wisatawan juga boleh mencoba berkunjung ke Pantai sebelah barat di lokasi Tanjung Ringgit. Wisatawan di sana dapat berperahu dengan mengunjungi tiga pulau kecil yang disebut Gili Petelu.

Nah, diantara gili-gili itu wisatawan dapat memberhentikan perahu dan menikmati pemandangan bawah laut dengan ber-snorkeling ria. Sedangkan lokasi di pantai arah sebelah selatan ada satu spot yang dikenal sebagai Tanjung Beloam.

Pantai ini pun menarik untuk dikunjungi. Sebab terdapat dinding terumbu yang tersingkap bukit setinggi 15 meter berbentuk kerucut yang terkikis gelombang. Dan jembatan terumbu yang terbentuk karena bagian bawah-

nya terkikis perlahan oleh arus Samudera Indonesia.

Hamparan pasir putih di bukit terumbu berlatar pemandangan Gunung Rinjani menjadi lokasi yang khas bagi Tanjung Beloam. Derasnya arus inilah yang mengikis tebing batu kapur yang menjadi keunikan tersendiri di lokasi ini.

Wisatawan yang ingin berkunjung ke Tanjung Ringgit tidaklah susah untuk menemukan tempat ini. Sebab lokasi wisata ini tidak jauh dari pusat kota Lombok, wisatawan dapat memulai perjalanan dari Tangsi.

Kawasan yang masuk ke dalam catatan sejarah pernah menjadi markas tentara Jepang dalam Perang Duni ke-II. Wisatawan yang berkunjung ke sana dapat melihat sisa meriam anti pesawat terbang di tengah tumbuhan perdu dan gua perlindungan di dinding selatan.

Jepang memilih lokasi ini untuk membangun pertahanan menghadapi serangan dari arah Samudera Indonesia. Itu bisa jadi mengantisipasi serangan tentara sekutu yang berasal dari Australia baik melalui darat atau udara.

Bagi wisatawan yang ingin melihat program transmigrasi lokal dapat pergi ke arah pantai selatan Sekaroh. Wisatawan dapat melihat masyarakat mencari air dengan menaiki tangga tali.

Dan dapat melihat budaya khas Sasak yang masih terjaga alami. Petani di sana masih mahir menulis dengan aksara Lombok (mirip aksara Jawa), bercerita tentang musim, rasi bintang.

